

**ANALISIS PENGARUH COST OF FUND, OVERHEAD COST,
BAD DEBT RATIO DAN NON PERFORMING LOAN
TERHADAP PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT
PADA PT. BANK BUKOPIN, Tbk DI JAKARTA
PERIODE JANUARI 2008 – DESEMBER 2008**

TESIS

DHANI TRESNO

0606147182



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
JAKARTA
MARET 2009**

**PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PENGARUH COST OF FUND, OVERHEAD COST,
BAD DEBT RATIO DAN NON PERFORMING LOAN
TERHADAP PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT
PADA PT. BANK BUKOPIN, Tbk DI JAKARTA
PERIODE JANUARI 2008 – DESEMBER 2008**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Manajemen**

DHANI TRESNO

0606147182



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
JAKARTA
MARET 2009**

i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Karya Akhir adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Dhani Tresno
No. Mahasiswa : 0606147182
Tanda Tangan : 
Tanggal : 27 Maret 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Karya Akhir ini diajukan oleh :
Nama : **Dhani Tresno**
NPM : 0606147182
Program Studi : **MAGISTER MANAJEMEN**
Judul Karya Akhir : Analisis Pengaruh *Cost of Fund, Overhead Cost, Bad Debt Ratio* dan *Non Performing Loan* Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Bukopin, Tbk di Jakarta Periode Januari 2008 – Desember 2008.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **Rofikoh Rokhim, Ph. D**

(*Rofikoh Rokhim*)

Penguji : **Prof. Dr. Suroso**

(*Suroso*)

Penguji : **Dr. Buddi Wibowo**

(*Buddi Wibowo*)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 27 Maret 2009

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan karya akhir ini tepat pada waktunya. Karya akhir ini dimaksudkan sebagai sebagian dari syarat-syarat guna meraih gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Karya akhir ini dimaksudkan untuk menambah wawasan, baik bagi penulis sendiri maupun untuk pembaca karya akhir ini. Sejak diluncurkan pada Januari 2008, KUR dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta memberikan kontribusi terhadap BDR dan NPL yang tinggi. Memperhatikan kondisi ini dan melihat begitu pentingnya KUR bagi sektor UKM maka haruslah dilakukan pengkajian mendalam efek KUR terhadap bank pelaksananya, sehingga penulis tertarik untuk membahasnya dalam penulisan karya akhir ini. Diharapkan dari penelitian ini penulis dapat memberikan manfaat yaitu untuk menjadi bahan masukan bagi pengembangan dan pengkajian konsep sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dan memutuskan KUR dikemudian hari. Disamping itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi para manajer/pengelola PT. Bank Bukopin, Tbk sebagai salah satu bank nasional yang sejak berdirinya telah mempunyai komitmen didalam pengembangan UKM dalam memasarkan produk KUR.

Dalam menyusun karya akhir ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- Bapak Rhenald Kasali, PhD, sebagai Ketua Program Magister Manajemen Universitas Indonesia.
- Bapak Dr. Irwan Adi Ekaputra, sebagai Sekretaris Program Magister Manajemen Universitas Indonesia.
- Ibu DR. Rofikoh Rokhim, selaku pembimbing karya akhir yang telah memberi masukan dan koreksi yang berharga atas penyelesaian karya akhir ini.
- Para dosen penguji Prof. Dr. Suroso selaku Ketua dan Dr. Buddi Wibowo selaku Anggota I.
- Para dosen, yang telah membagi ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan.
- Seluruh karyawan MM-UI, yang telah membantu proses perkuliahan
- Kepada rekan-rekan kerja di Bukopin Cab. Mataram, yang telah memberikan semangat, dorongan, dan segala bantuan untuk menyelesaikan karya akhir ini.
- Kedua orang tua penulis yang telah mendo'akan penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini tepat pada waktunya.
- Sumber inspirasiku, istriku tercinta Baiq Arinta Trisatyana dan anak-anakku, M. Firza Fakhriya Dhani, M. Mufti Fadhillah & Azzura Taqiya Mafaza.
- Rekan – rakan di Bukopin Fiddy, Ferry, Adi S, Fikri, Donny, Engga, Anas, Pak Bayu, Anggi, Dika, Furqon, yang telah banyak membantu di tengah – tengah kesibukan kerja.

- Sahabat seperguruan Benny, Bayu, Adjar & Fathullah yang telah memberikan motivasi & semangat untuk penyelesaian karya akhir ini.
- Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan penulisan karya akhir ini.

Akhir kata, penulis berharap dengan penulisan karya akhir ini dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan dan pengkajian konsep sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dan memutuskan KUR dikemudian hari disamping itu diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi para manajer/pengelola PT. Bank Bukopin, Tbk sebagai salah satu bank nasional yang sejak berdirinya telah mempunyai komitmen didalam pengembangan UKM dalam memasarkan produk KUR.

Penulis mohon maaf kepada semua pihak, apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, selama penulis menyelesaikan studi di Magister Manajemen Universitas Indonesia.

Jakarta, Maret 2009

Dhani Tresno

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhani Tresno
NPM : 0606147182
Program Studi : Magister Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Karya Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Pengaruh Cost of Fund, Overhead Cost, Bad Debt Ratio dan Non Performing Loan Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Bukopin, Tbk di Jakarta Periode Januari 2008 – Desember 2008

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Maret 2009

Yang menyatakan



(Dhani Tresno)

ABSTRAK

Nama : Dhani Tresno
Program Studi : Magister Manajemen
Judul : Analisis Pengaruh Cost of Fund, Overhead Cost, Bad Debt Ratio dan Non Performing Loan Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Bukopin, Tbk di Jakarta Periode Januari 2008 – Desember 2008

Membaiknya kondisi makroekonomi dalam beberapa tahun terakhir yang tercermin dari terkendalinya laju inflasi, stabilnya nilai tukar, dan turunnya suku bunga, namun kredit yang disalurkan perbankan belum cukup menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi untuk kembali pada level sebelum krisis. Apalagi platform ekonomi yang berbasis pada pengembangan usaha sektor mikro, kecil, dan menengah belum mampu dikembangkan secara maksimal, mengingat perilaku penawaran kredit perbankan kepada sektor ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel terhadap penawaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara parsial maupun keseluruhan pada sektor UKM. Metode analisis yang digunakan adalah *analisis deskriptif*, dilanjutkan dengan analisis korelasi.

Hasil penelitian dalam kurun waktu Januari 2008 – Desember 2008 memperoleh kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, *Cost of Fund*, *Overhead Cost*, *Bad Debt Ratio* dan *Non Performing Loan* berdampak pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). *Kedua*, secara serempak variabel-variabel *Cost of Fund*, *Overhead Cost*, *Bad Debt Ratio* dan *Non Performing Loan* berpengaruh nyata dan signifikan terhadap penawaran Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Bukopin, Tbk di Jakarta. *Ketiga*, secara parsial variabel *Cost of Fund*, *Overhead Cost*, *Bad Debt Ratio* dan *Non Performing Loan* berdampak positif dan signifikan terhadap penawaran Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Bukopin, Tbk di Jakarta.

Kata kunci : penawaran Kredit Usaha Rakyat, *Cost of Fund*, *Overhead Cost*, *Bad Debt Ratio* dan *Non Performing Loan*, sektor UKM.

ABSTRACT

Name : Dhani Tresno
Study Program: Magister Manajemen
Title : *The Analysis Effect of Cost of Fund, Overhead Cost, Bad Debt Ratio and Non Performing Loan Toward The Distribution of "Kredit Usaha Rakyat" at PT. Bank Bukopin, Tbk in Jakarta Period of January 2008 – December 2008.*

The improvement of macroeconomic condition for several recent years is shown by controlled inflation Rate, stable exchange rate and the decrease of interest rate, however, the credit distributed by banking has not been sufficient to be a supporting machine for economical growth to return to prior crisis level. Moreover, the economical platform based on the micro sector business development – small and medium Business have no capability to be optimally developed, recalling that behavior of banking credit offer toward this is affected very much by several sectors.

The objective of this research is to analyze the effect of some variables to "kredit usaha rakyat" offer partially and simultaneously to UKM sector. The analysis methods applied is descriptive analysis, followed by correlation analysis.

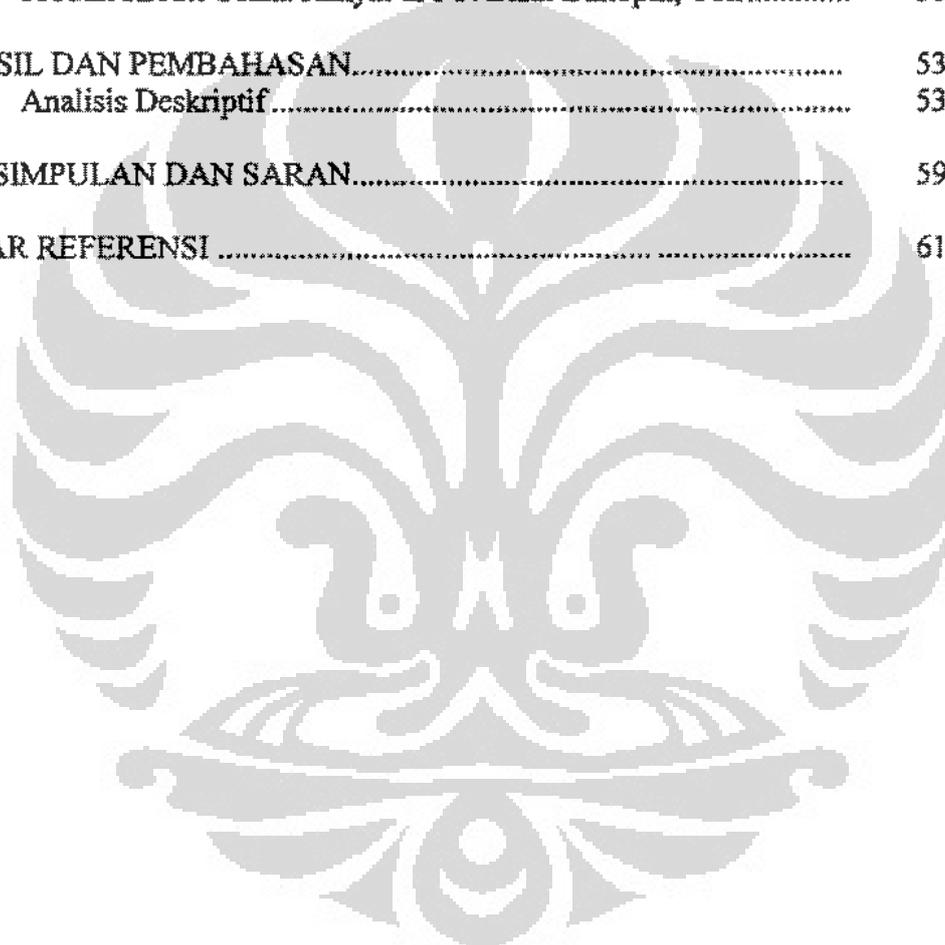
The result of analysis in the period of January 2008 – Desember 2008 concludes as follows : *First, Cost of Fund, Overhead Cost, Bad Debt Ratio and Non Performing Loan* has been impacted to "Kredit Usaha Rakyat" program. *Second*, simultaneously, the variable of *Cost of Fund, Overhead Cost, Bad Debt Ratio and Non Performing Loan* gives significant effect to "kredit usaha rakyat" . *Third*, partially, *Cost of Fund, Overhead Cost, Bad Debt Ratio and Non Performing Loan* variable gives significant and positive impacts to "Kredit Usaha Rakyat " to UKM sector at PT. Bank Bukopin, Tbk in Jakarta.

Key words : "Kredit Usaha Rakyat" offer, *Cost of Fund, Overhead Cost, Bad Debt Ratio and Non Performing Loan*, UMKM sector

DAFTAR ISI

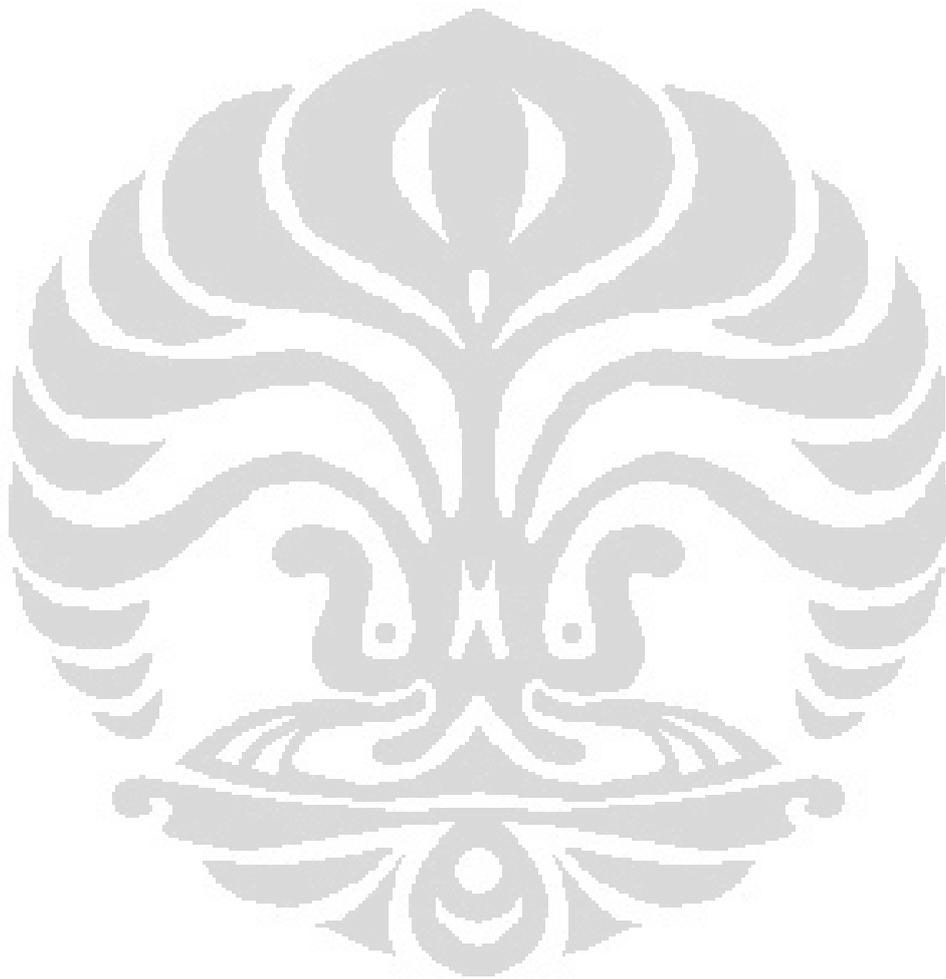
	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Pembatasan Masalah.....	7
1.5. Sistematika Pembahasan.....	7
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	9
2.1. Tinjauan Teoritis.....	9
2.1.1. Definisi Kredit	9
2.1.2. Tujuan Kredit.....	10
2.1.3. Fungsi Kredit	11
2.1.4. Jenis-jenis Kredit	12
1. Menurut Jenis Kredit yang Dibiayai.....	12
2. Menurut Resiko Pembiayaan.....	13
3. Menurut Sektor Ekonomi.....	13
4. Macam-macam Kredit.....	14
2.1.5. Prinsip-prinsip Kredit	16
2.1.6. Kebijakan Per Kreditan.....	17
2.1.7. Pertimbangan dan Penilaian Dalam Pemberian Kredit.....	18
2.1.8. Jaminan dan Kelayakan Kredit.....	18
2.1.9. Definisi Usaha Kecil dan Mikro	19
2.1.10 Analisa Kredit.....	22
2.1.11 Kualitas Kredit.....	24
2.1.12 Perilaku Penawaran Kredit	26
2.1.13 Regresi Logistik.....	27
2.2. Kajian Penelitian Terdahulu	29
2.3. Kerangka Pemikiran	32
3. METODOLOGI PENELITIAN.....	34
3.1. Lokasi dan Waktu	36
3.2. Pendekatan Penelitian	37
3.3. Data yang Diperlukan dan Sumbernya	37

3.4. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi	37
3.5. Teknik Pengambilan Contoh	38
3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
4. PROFIL PERUSAHAAN.....	40
4.1. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank Bukopin, Tbk.....	40
4.2. Visi, Misi dan Nilai-nilai PT. Bank Bukopin, Tbk.....	43
4.3. Nilai Perusahaan (<i>Corporate Value</i>),.....	43
4.4. Arah Pengembangan PT. Bank Bukopin, Tbk.....	44
4.5. Kebijakan Umum.....	46
4.6. Strategi dan Kebijakan Pengembangan UKMK	48
4.7. Produk Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Bukopin, Tbk.....	50
5. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
5.1. Analisis Deskriptif.....	53
6. KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
DAFTAR REFERENSI	61



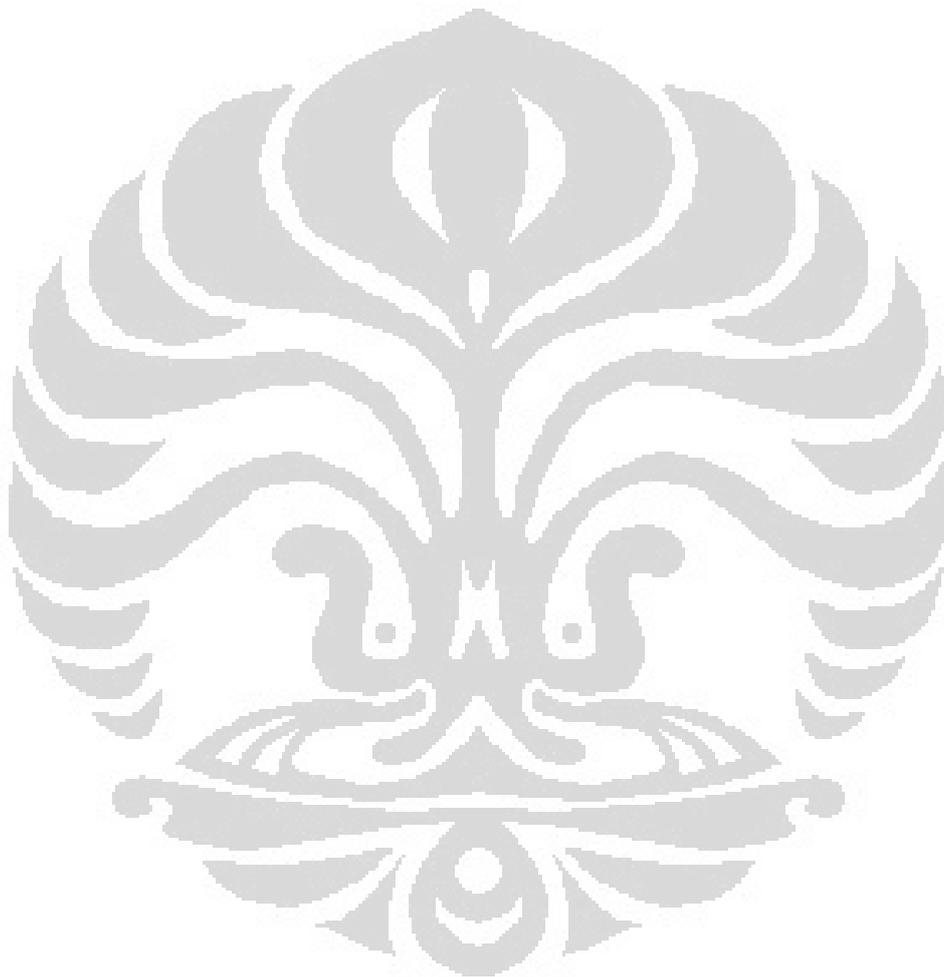
DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	Kerangka Pemikiran	33
----------	--------------------------	----



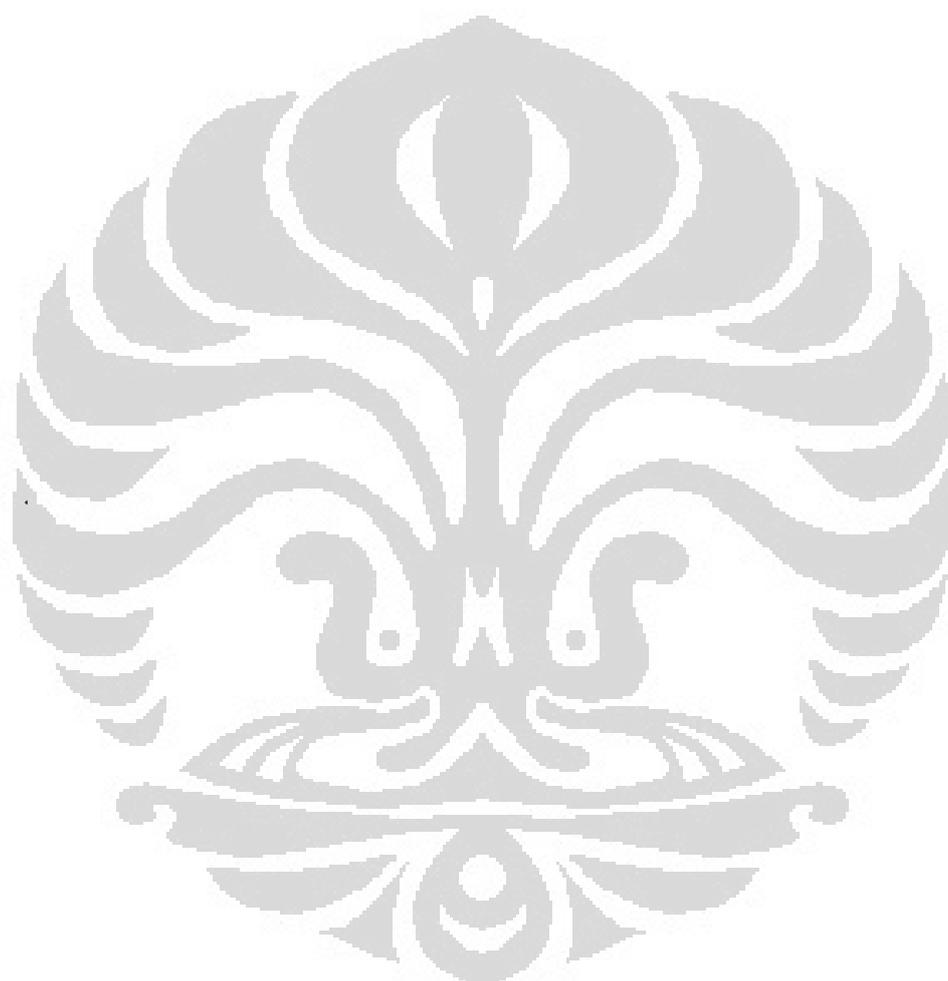
DAFTAR TABEL

TABEL 4.1	Posisi 6 Bank Pelaksana KUR Bulan April & Mei 2008	51
-----------	--	----



DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 4.1	Pangsa Pasar 6 Bank Pelaksana KUR Posisi April 2008	52
------------	---	----



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis ekonomi telah menyulitkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berdampak terhadap pengangguran, hilangnya penghasilan serta kesulitan memenuhi kebutuhan pokok yang merupakan persoalan-persoalan sosial yang sangat dirasakan masyarakat sebagai akibat dari krisis ekonomi. Hasil survei yang dilakukan Bank Dunia bekerjasama dengan Ford Foundation dan Badan Pusat Statistik (September-Oktober 1998) menegaskan bahwa ketiga persoalan itu oleh masyarakat ditempatkan sebagai persoalan prioritas atau harus segera mendapatkan penyelesaian (Wetterberg et.al, 1999). Dengan kata lain, ketiga hal itu merupakan persoalan sangat pelik yang dihadapi masyarakat pada umumnya.

Kinerja perekonomian Indonesia seperti tercermin dalam angka Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2007 mengalami pertumbuhan sebesar 6,3 persen terhadap tahun sebelumnya, dimana pertumbuhan PDB Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mencapai 6,4 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor bangunan 9,3 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 8,5 persen, dan sektor pertambangan dan penggalian 7,8 persen. (Badan Pusat Statistik; Mei ;2008)

Pada tahun 2007 nilai PDB UKM mencapai Rp 2.121,3 triliun meningkat sebesar Rp 335,1 triliun dari tahun 2006. Dari jumlah ini UKM memberikan kontribusi sebesar 53,6 persen dari total PDB Indonesia, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai Rp 1.786,2 triliun atau 53,5 persen. Pada tahun 2007 kontribusi Usaha Kecil (UK) sebesar Rp 1.496,3 triliun (37,8

persen), Usaha Menengah (UM) sebesar Rp 625,1 triliun (15,8 persen), dan Usaha Besar (UB) sebesar Rp 1.836,1 triliun (46,4 persen). (Badan Pusat Statistik ;Mei ;2008)

Bila ditelaah secara sektoral UKM memiliki keunggulan dalam sektor tersier seperti perdagangan, hotel dan restoran dan bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam (pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan dan perikanan). Penciptaan nilai tambah UKM di masing-masing sektor tersebut masing-masing tercatat rata-rata 96,4 persen dan 95,7 persen selama periode 2006-2007. Sebaliknya UB memiliki keunggulan dalam sektor padat modal seperti listrik, gas dan air bersih serta pertambangan dan penggalian, dan pengolahan lebih lanjut dari produk hasil ekstraksi sumber daya alam (industri pengolahan). Di masing-masing sektor ini peranan UB dalam menciptakan nilai tambah adalah 91,9 persen, 88,6 persen dan 76,1 persen. (Badan Pusat Statistik; Mei; 2008)

Dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,3 persen di tahun 2007 sumbangan UK terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 2,4 persen dan hanya 1,2 persen saja yang berasal dari UM, sedangkan UB menyumbangkan 2,7 persen. Ini menunjukkan walaupun akselerasi pertumbuhan kelompok UK dan UB pada umumnya tidak secepat UM, namun dengan peranannya yang cukup besar dalam penciptaan nilai tambah nasional sumbangan kedua kelompok usaha ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi menjadi cukup signifikan peranannya.

Melihat kondisi ini serentak merubah paradigma perbankan Indonesia. Sebagian besar bank melakukan pembiayaan ke sektor usaha kecil, dan menengah (UKM). Reorientasi bisnis perbankan didorong oleh fakta bahwa ternyata sektor UKM memilih ketangguhan (daya tahan) lebih baik dalam menghadapi berbagai gejolak ekonomi dan lebih fleksibel dalam menyikapi setiap perubahan lingkungan bisnis.

Fakta dibuktikan dengan semakin banyaknya bank masuk ke sektor perbankan ritel (*retail banking business*) di mana sektor UKM menjadi “tulang punggung”-nya. Reorientasi inipun didukung oleh perkembangan jumlah UKM periode 2005-2006 mengalami peningkatan sebesar 3,88% yaitu dari 47.102.744 unit pada tahun 2005 menjadi 48.929.636 unit pada tahun 2006 (Sumber : Kementerian Negara Koperasi dan UKM). Dalam hal ini, sudah beberapa kali Bank Indonesia melonggarkan kebijakan di bidang perkreditan, tapi faktanya fungsi intermediasi perbankan terasa masih jalan di tempat. Di tahun 2006 lalu, pertumbuhan kredit hanya 14%. Jauh di bawah target revisi yang 18%. Alhasil, daya dorong sektor perbankan dan sektor riil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak maksimal dan bahwa pasca krisis ekonomi dan moneter 1997/1998 di Indonesia memberikan gambaran nyata betapa peran strategis sektor perbankan tak terbantahkan. (*Bank Indonesia-Economic Review, Juni 2007*).

Saat perbankan melirik sektor UKM untuk dikembangkan pada akhirnya memiliki beberapa kendala yang menjadi penghambat bagi kedua belah pihak. Maka pemerintah berusaha melakukan pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM salah satunya dengan mendirikan Kementerian Koperasi dan UKM yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peran Koperasi dan UKM sebagai bagian integral dalam perekonomian nasional. Tujuan lainnya ialah untuk menumbuhkannya menjadi usaha yang efisien, sehat dan mandiri dan mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Penelitian pada perusahaan besar juga telah membuktikan bahwa penggunaan informasi akuntansi akan mempengaruhi prestasi perusahaan dan atau prestasi manajer (Chong & Chong, 1997; Chong, 1996; Chia, 1995; Gul, & Chia, 1994; Gul, 1991).

Dalam kenyataannya, koperasi dan UKM belum mampu menunjukkan perannya secara optimal seperti yang diharapkan. Salah satu hambatan dan kendala dimaksud adalah lemahnya system pendanaan untuk membiayai aktivitas usahanya. Koperasi dan UKM mengalami kesulitan untuk mengakses sumber-sumber permodalan atas lembaga keuangan terutama dari sektor perbankan. Koperasi dan UKM belum mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit yang biasanya diukur dengan 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*). Capital dan collateral adalah dua faktor yang paling sulit dipenuhi. Selain masalah 5C di atas, koperasi dan UKM mengalami berbagai masalah dalam memperoleh kredit bank, seperti bunga tinggi, jangkauan pelayanan bank yang masih terbatas. (Kantor Kementrian Koperasi dan UKM; 2007)

Selain itu juga, sekalipun UKM memiliki peranan penting pada kebanyakan negara, termasuk Indonesia, ternyata faktor lain yang menjadi kelemahan koperasi dan UKM adalah lemahnya laporan keuangan, sedangkan penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan akan mempengaruhi prestasi perusahaan (Suhairi, 2004; McMahon, 2001; Palmer & Palmer, 1996; Palmer & Hot, 1995; Gaskill, Auken, dan Manning, 1993; Acar, 1993; Rocha & Khan, 1985; Peacock, 1985).

Dengan perkembangan ekonomi, posisi UKM menjadi sangat penting dan menarik perbankan untuk terjun melakukan pembiayaan. PT. Bank Bukopin Tbk sebagai salah satu bank nasional yang sejak berdirinya telah mempunyai komitmen didalam pengembangan UKM, termasuk pemerintah begitu fokus dalam pengembangan UKM sehingga mengeluarkan suatu produk yang dikenal dengan nama KUR (Kredit Usaha Rakyat). Faktor yang membedakan dalam pemberian kredit ini adalah adanya pengurangan atas ratio jaminan dalam pemberian kredit. Ratio

jaminan kredit umum lainnya, seperti yang tertuang pada Peraturan Perkreditan Bank Bukopin mewajibkan calon debitur untuk menggunakan jaminan sebesar 1:1,25 dari plafond kredit yang diberikan. Sedangkan KUR hanya mewajibkan calon debitur menyediakan jaminan sebesar 30-40% dari plafond kredit yang diajukan. Dimana sisa ratio jaminan dibayarkan oleh pemerintah daam bentuk premi asuransi kepada ASKRINDO. Dengan kondisi seperti itu, diharapkan dapat mendorong sektor riil untuk mampu bergerak dan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pinjaman kredit.

Faktor lain yang menjadi permasalahan adalah ternyata memunculkan resiko yang tinggi dalam menciptakan BDR (*Bad Debt Ration*) dan NPL (*Non Performing Loan*). Dengan kondisi jaminan yang rendah (30-40%) memunculkan efek *willingness to pay* yang rendah dari para debitur. Tingginya BDR dan NPL tidak sebanding dengan pendapatan bunga ditambah lagi tingginya pencadangan penghapusan aktiva yang harus dialokasikan.

Saat ini divisi pengembangan UKM Bank Bukopin telah menciptakan *tools* kredit yaitu *Internal Credit Risk Rating (ICRR)* yang merupakan alat analisa didalam memutuskan suatu permohonan kredit. Hal ini sejalan dengan akan dilaksanakan Basel II tentang risiko bank dan sekaligus sebagai antisipasi dini memburuknya kualitas kredit. Khusus untuk ICRR plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta, sekaligus berfungsi sebagai proposal kredit dan pemutus kredit. Sedangkan ICRR diatas Rp 500 juta hanya berfungsi sebagai pendamping proposal (bukan sebagai pemutus kredit).

1.2. Perumusan Masalah

Sejak diluncurkan pada Januari 2008, KUR dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta memberikan kontribusi terhadap BDR dan NPL yang tinggi. Faktor pembatas lainnya adalah tingkat suku bunga yang sudah ditentukan oleh pemerintah berkisar 14-16% tanpa memperhatikan berapa sebenarnya *Cost of Fund* suatu bank dalam mendapatkan dana pihak ketiga. Memperhatikan kondisi ini dan melihat begitu pentingnya KUR bagi sektor UKM haruslah dilakukan pengkajian mendalam efek KUR terhadap bank pelaksananya. Adapun perumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh variabel *Cost of Fund*, *Overhead Cost*, *Bad Debt Ratio* dan *Non Performing Loan* terhadap penyaluran kredit KUR baik kredit investasi dan kredit modal kerja secara parsial kepada sektor UKM pada PT. Bank Bukopin, Tbk di Jakarta periode Januari 2008 - Desember 2008 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dibuat, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh variabel *Cost of Fund*, *Overhead Cost*, *Bad Debt Ratio* dan *Non Performing Loan* terhadap penawaran kredit KUR baik kredit investasi dan kredit modal kerja secara parsial kepada sektor UKM pada PT. Bank Bukopin, Tbk di Jakarta periode Januari 2008 - Desember 2008 ?

1.4. Pembatasan Masalah

Ruang Lingkup Penelitian dalam penelitian ini hanya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. KUR dengan plafon kredit hanya sampai dengan Rp 500 juta karena sesuai dengan perjanjian antara pemerintah dengan PT. Bank Bukopin, Tbk sebagai bank pelaksana.
2. Daerah yang diteliti adalah Jakarta, karena daerah ini merupakan daerah yang memiliki NPL terbesar dan merupakan daerah yang mempunyai debitur KUR paling banyak sejak Januari 2008 - Desember 2008.

1.5. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan karya akhir ini akan terbagi dalam beberapa bab yang mencakup keseluruhan isi secara satu kesatuan yang utuh, sistematika tersebut adalah:

Bab I. Pendahuluan

Bab Pendahuluan ini berisi uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah dan pemilihan metodologi yang digunakan.

Bab II. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Bab ini membahas teori yang berkaitan dengan karya akhir dan landasan analisis yang digunakan.

Bab III. Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan metodologi yang akan digunakan.

Bab IV. Profil Perusahaan

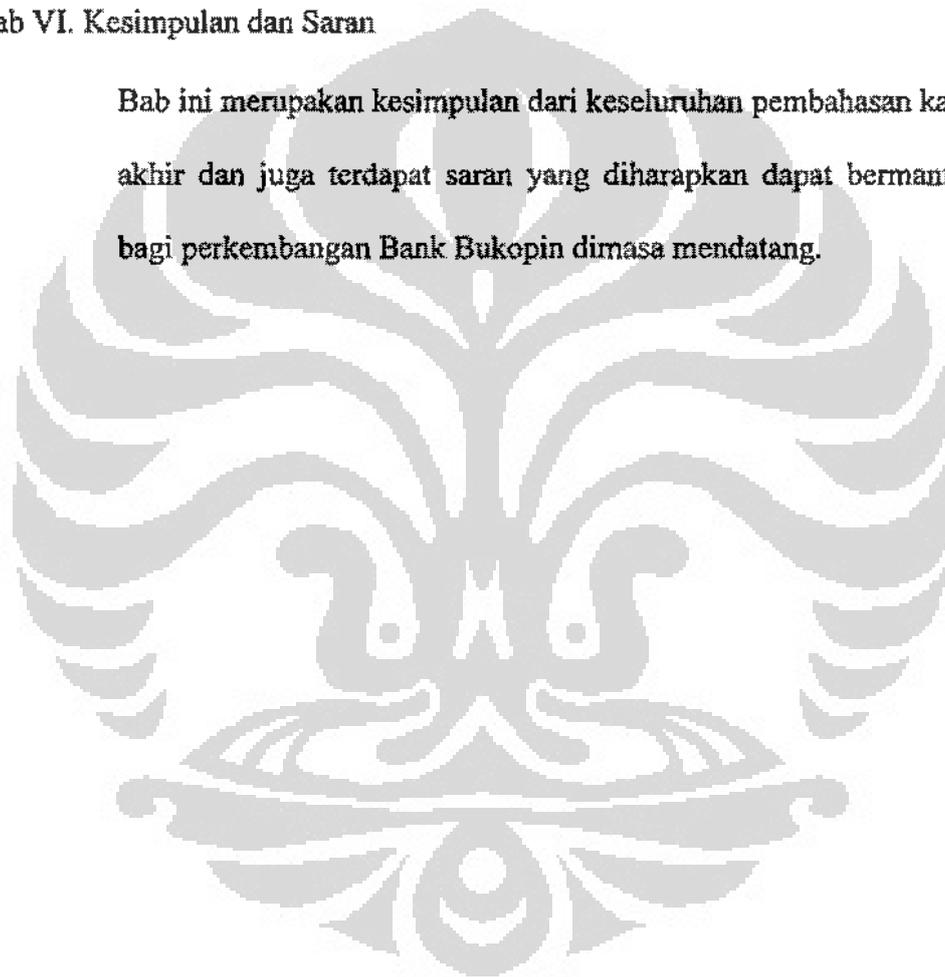
Bab ini menjelaskan gambaran umum Bank Bukopin dan strategi dan kebijakan pengembangan UMKM Bank Bukopin.

Bab V. Hasil dan Pembahasan

Bab ini menguraikan temuan dan analisis hasil pengolahan data.

Bab VI. Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan karya akhir dan juga terdapat saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Bank Bukopin dimasa mendatang.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Definisi Kredit

Kredit menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang, pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti "kredit" yang berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti "kepercayaan" karena itu dasar kredit adalah kepercayaan. Dengan demikian seseorang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan. Kredit dalam bahasa latin adalah "*creditum*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran, dalam praktek sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain: (Muljono, 1993) 1. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditanggungkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. 2. Sedangkan pengertian yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia, yaitu menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1998 dalam pasal 1; kredit adalah

Universitas Indonesia

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.1.2. Tujuan Kredit

Tujuan kredit mencakup scope yang luas, ada dua fungsi pokok yang saling berkaitan dengan kredit adalah: (Sinungan, 1995).

1. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari pemungutan bunga.
2. Safety, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Tujuan kredit berarti tidak lepas dari falsafah yang dianut oleh suatu negara karena pada dasarnya tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut, seperti pada negara-negara liberal di mana dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Pemberian kredit yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit apabila nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya itu. Dari faktor kemauan dan kemampuan tersebut, maka tersimpul suatu unsur keamanan dan unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit.

2.1.3. Fungsi Kredit

Kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan sangat penting. Oleh karena itu, organisasi-organisasi bank selalu diikuti sertakan dalam menentukan kebijaksanaan di bidang moneter, pengawasan devisa, dan lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank merupakan pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya di bidang ekonomi (Sutojo, 2000).

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan daya guna dari modal atau uang

Yaitu para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya selain itu juga dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan.

2. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari suatu barang

Yaitu dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat.

3. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Yaitu kredit yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral.

2.1.4. Jenis-Jenis Kredit

1. Menurut Jenis Kredit Yang Dibiayai

a. Kredit modal kerja

Kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi modal kerjanya. Kriteria dari modal kerja yaitu kebutuhan modal yang habis dalam satu *cycle* usaha, hal ini kalau dilihat dalam neraca suatu perusahaan akan berupa uang kas/ bank ditambah dengan piutang dagang ditambah dengan persediaan baik persediaan barang jadi, persediaan bahan dalam proses, persediaan bahan baku. Apabila dibicarakan modal kerja bersih maka perlu dikurangi lagi dengan *current liabilities* nya.

b. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk pembelian barang-barang modal yaitu tidak habis dalam satu *cycle* usaha, maksudnya proses dari pengeluaran uang kas dan kembali menjadi uang kas tersebut akan memakan jangka waktu yang cukup panjang setelah melalui beberapa kali perputaran (Mulyono, 1993).

Misalnya seorang debitur mendapatkan kredit untuk mendirikan pabrik, atau barang modal lainnya. Uang kas yang dikeluarkan untuk membeli barang-barang modal tersebut akan baru dapat terhimpun kembali setelah melalui proses depresiasi/ deplesi/ amortisasinya sesuai jangka waktu ekonomisnya (*economical useful life*) yang mana dana depresiasi yang berupa *out of pocket cost* tersebut dikumpulkan. Jadi ada 2 ciri pokok dari kredit investasi yaitu: barang yang akan dibeli merupakan barang-barang modal dan jangka waktunya cukup lama.

c. Kredit Konsumsi (*Personal Loan*)

Bentuk kredit yang diberikan kepada perorangan ini bukan dalam rangka untuk mendapatkan laba tetapi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi.

2. Menurut Resiko Pembiayaan

a. Kredit dari dana bank yang bersangkutan

Dasar dari kredit ini diberikan atas dasar kemampuan dari bank yang bersangkutan didalam mengumpulkan dana dari masyarakat yang menjadi nasabahnya baik berupa giro, deposito maupun modal sendiri dan pinjaman-pinjaman lainnya.

b. Kredit dengan dana likuiditas Bank Indonesia

Sesuai dengan fungsinya bank sebagai *agent of development* khususnya pada bank-bank pemerintah, maka dalam pengembangan sektor-sektor perekonomian tertentu bank sentral telah memberikan berbagai fasilitas penyediaan "Dana Likuiditas".

c. Kredit Kelolaan

Kredit ini diperoleh Pemerintah Indonesia dari Luar Negeri untuk membantu berbagai pembiayaan pembangunan proyek-proyek swasta/ pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk bantuan kredit yang disalurkan melalui sistem perbankan (Muljono, 2000).

3. Menurut Sektor Ekonomi

Untuk kepentingan perencanaan pengembangan kegiatan perekonomian maka pembagian sektor-sektor ekonomi mempunyai arti yang sangat penting. Penguasa

moneter dan bank sentral mempunyai kepentingan utama dalam pembagian kredit menurut sektoral, sebagai alat perencanaan dan penegendalian kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambilnya. Secara garis besar pembagian kredit menurut sektor ekonomi (Suharjono, 2003) :

- a. Sektor pertanian, perkebunan, dan sarana pertanian
- b. Sektor pertambangan
- c. Sektor perindustrian
- d. Sektor listrik, gas, dan air
- e. Sektor konstruksi
- f. Sektor perdagangan, restoran, dan hotel
- g. Sektor pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi
- h. Sektor jasa-jasa dunia usaha
- i. Sektor jasa-jasa sosial atau masyarakat

4. Macam-Macam Kredit

Berdasarkan berbagai keperluan usaha serta berbagai unsur ekonomi yang mempengaruhi bidang usaha para nasabah, maka jenis kredit menjadi beragam, yaitu berdasarkan: sifat penggunaan, keperluan, jangka waktu, cara pemakaian, dan jaminan atas kredit-kredit yang diberikan bank (Santoso; 2001).

a. Macam-macam kredit menurut sifat penggunaan, ada dua macam, antara lain :

1. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi. Artinya uang kredit akan habis digunakan untuk semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Kredit ini tidak bernilai bila ditinjau dari segi utility uang.

2. Kredit produktif, yaitu kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Melalui kredit produktif ini suatu utility uang dan barang dapat terlihat dengan nyata. Tegasnya kredit ini digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Kredit produktif yang disediakan dalam rangka menunjang program pembangunan antara lain : Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Bimas / Inmas, Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Kecil (KUK).

b. Macam – macam kredit menurut keperluannya, dibedakan menjadi :

1. Kredit Produksi/ Eksploitasi, yaitu kredit yang diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif maupun peningkatan kualitatif. Kredit ini disebut kredit Eksploitasi karena bantuan modal kerja tersebut digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas.
2. Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan dari suatu barang. Kredit perdagangan ini dapat terbagi dua yaitu Kredit Perdagangan Dalam Negeri dan Kredit Perdagangan Luar Negeri atau lebih dikenal dengan Kredit Ekspor dan Impor.
3. Kredit Investasi, yaitu kredit yang diberikan bank untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun mendirikan usaha proyek baru. Ciri dari kredit ini adalah diperlukan untuk penanaman modal, mempunyai perencanaan yang

terarah dan matang, dan waktu penyelesaian kredit berjangka menengah dan panjang.

c. Macam-Macam Kredit Menurut Jangka Waktu

Pembedaan menurut jangka waktu di Indonesia, disesuaikan dengan pengertian menurut pengaturan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut :

1. Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit untuk jangka waktu kurang dari pada 1 tahun.
2. Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 2–4 tahun.
3. Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit untuk waktu 5 tahun atau lebih.

2.1.5. Prinsip-Prinsip Kredit

Melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat, maka dikenal adanya 5 (lima) prinsip perkreditan (Kasmir, 2001), yaitu :

1. *Character* (kepribadian, watak)

Menunjukkan adanya pelanggan untuk secara jujur berusaha untuk memenuhi kewajiban untuk membayar kembali.

2. *Capital* (modal, kekayaan)

Modal yang ada pada peminjam hakekatnya akan mengurangi resiko modal tersebut meliputi barang bergerak serta barang tidak bergerak yang ada dalam perusahaan.

3. *Condition* (keadaan)

Bank harus menilai sampai dimana dan berapa jauh pengaruh dari adanya suatu kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi terhadap prospek

industri dimana perusahaan pemohon kredit termasuk di dalamnya, disini apakah pelaksanaan usaha dilakukan dalam keadaan baik sehingga dapat berjalan lancar serta menguntungkan .

4. *Capacity* (kemampuan, kesanggupan)

Kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan serta mengendalikan usahanya dan mengembalikan pinjamannya.

5. *Collateral* (jaminan)

Menunjukkan jaminan untuk mendapatkan kredit yang diberikan oleh pihak bank.

2.1.6. Kebijakan Per Kreditan

Menetapkan kebijaksanaan per kreditan terdapat tiga asas pokok yang harus diperhatikan (Mulyono, 1993) :

1. Asas Likuiditas

Suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan dari nasabahnya atau dari masyarakat luas.

2. Asas Solvabilitas

Usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit.

3. Asas Rentabilitas

Sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha akan selalu mengharapkan akan memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan untuk mengembangkan dirinya.

2.1.7. Pertimbangan dan Penilaian Dalam Pemberian Kredit

Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 pasal 8 menjelaskan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Maksud dari pasal tersebut bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur (Suyatno et.al, 1995).

2.1.8. Jaminan Dan Kelayakan Kredit

Jaminan kredit menurut bank, merupakan sumber kedua pembayaran kembali kredit dan bunga yang tertunggak. Sumber pertama pembayaran kembali kredit adalah dana intern perusahaan terutama keuntungan dan dana penyusutan. Bila debitur gagal memenuhi kewajiban keuangannya kepada bank dari sumber pembayaran pertama, maka harta mereka yang dijamin akan dipergunakan sebagai gantinya (Sutojo, 2000).

Bank akan meluluskan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur tergantung dari hasil pertimbangan berikut ini (Sutojo, 2000) :

1. Faktor Intern Bank

Sebelum mengambil keputusan untuk meluluskan permintaan kredit (terutama dalam jumlah besar) terlebih dahulu bank akan memeriksa kondisi intern operasi dan keuangan dewasa ini, dua tiga tahun terakhir, serta prospek masa depan.

2. Kredibilitas

Bank akan lebih bersemangat dalam bekerja sama dengan investor, apabila mitra usaha mereka dapat menunjukkan kemampuan mengelola proyek yang akan dibangun dengan bank.

3. Prospek Masa Depan Proyek

Masa depan sebuah proyek dapat diharapkan akan cerah, bila proyek tersebut dapat memenuhi kriteria berikut ini :

- a. Dikelola oleh manajemen yang profesional.
 - b. Didukung oleh sumber daya manusia yang dapat menjalankan operasi proyek dengan baik.
 - c. Dapat memproduksi barang atau jasa yang kompetitif.
4. Dapat memasarkan hasil produksi tersebut secara menguntungkan.
 5. Dapat menghasilkan keuntungan yang layak.

2.1.9. Definisi Usaha Kecil dan Mikro

Ada beberapa acuan tentang definisi Usaha Kecil dan Mikro yang digunakan oleh berbagai instansi di Indonesia, diantaranya adalah :

1. UU No.9 tahun 1995 tentang usaha kecil mengatur kriteria usaha kecil berdasarkan nilai aset tetap (di luar tanah dan bangunan) paling besar Rp 200 juta dengan omzet per tahun maksimal Rp 1 milyar. Sementara itu berdasarkan Inpres No.10 tahun 1999 tentang usaha menengah, batasan aset tetap (di luar tanah dan bangunan) untuk usaha menengah adalah Rp 200 juta hingga Rp 10 milyar.
2. Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menggolongkan suatu usaha sebagai usaha kecil jika memiliki omzet kurang dari Rp 1 milyar per tahun. Untuk usaha menengah, batasannya adalah usaha yang memiliki omzet antara Rp 1 sampai dengan Rp 50 milyar per tahun. Berdasarkan definisi tersebut, Kementrian Koperasi dan UKM pada tahun 2002 menunjukkan populasi usaha kecil mencapai sekitar 41,3 juta unit atau sekitar 99,85 persen dari seluruh jumlah usaha di Indonesia; sedangkan usaha menengah berjumlah sekitar 61,1 ribu unit atau 0,15 persen dari seluruh usaha di Indonesia. Sementara itu persebaran UKM paling banyak berada di sektor pertanian (60 persen) dan perdagangan (22 persen) dengan total penyerapan tenaga kerja di kedua sektor tersebut sekitar 53 juta orang (68 persen penyerapan tenaga kerja secara total).
3. Departemen Perindustrian dan Perdagangan menetapkan bahwa industri kecil dan menengah adalah industri yang memiliki nilai investasi sampai dengan Rp. 5 milyar. Sementara itu, usaha kecil di bidang perdagangan dan industri juga dikategorikan sebagai usaha yang memiliki aset tetap kurang dari Rp. 200 juta dan omzet per tahun kurang dari Rp. 1 miliar (sesuai UU No. 9 tahun 1995).

4. Bank Indonesia menggolongkan Usaha Kecil dengan merujuk pada UU No. 9/1995 untuk usaha kecil ditambah dengan kriteria plafon kredit. Berdasarkan kriteria yang terakhir, usaha mikro digolongkan sebagai usaha dengan plafon kredit kurang dari Rp. 50 juta, sedangkan untuk usaha kecil plafon kreditnya antara Rp. 50 – 500 juta. Untuk usaha menengah, BI menentukan sendiri kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp. 200 juta s/d Rp. 5 miliar) dan non manufaktur (Rp. 200 – 600 juta). Namun kriteria plafon kredit untuk usaha menengah menggunakan ukuran yang sama yaitu antara Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 5 milyar. Atau menurut Peraturan Bank Indonesia No. 4/6/PBI/2002 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/Kep/Dir tanggal 12 november 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, Kredit Usaha Kecil yang selanjutnya disebut dengan KUK, adalah Kredit atau pembiayaan dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja yang diberikan dalam Rupiah dan Valuta Asing kepada nasabah Usaha Kecil dengan plafon keseluruhan maksimum sebesar Rp. 500 juta untuk membiayai usaha produktif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
5. Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan suatu usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pekerja 1-19 orang; usaha menengah memiliki pekerja 20-99 orang; dan usaha besar memiliki pekerja sekurang-kurangnya 100 orang (BPS-Statistik Indonesia 2005).

6. Bank Bukopin menetapkan defnisi Usaha Mikro adalah adalah kredit dengan plafond maksimal Rp 150 juta dan Usaha Kecil dan Menengah antara Rp 150 juta sampai dengan Rp 10 Miliar.

2.1.10. Analisa Kredit

Menurut Siamat (1993), analisa kredit adalah proses menganalisa dan menilai prospek calon debitur guna memperoleh indikasi kemungkinan terjadinya *default* (kegagalan nasabah membayar kembali kredit yang diterimanya) oleh calon debitur. Sedangkan analisa kredit menurut Bintoro (2002), adalah suatu teknik analisa untuk mengambil keputusan kredit dalam situasi kondisi yang tidak menentu dan banyaknya informasi yang tidak lengkap.

Didalam proses analisa kredit dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain jumlah kredit, penggunaan kredit, perangkat teknologi bank dan hubungan historis antara nasabah dengan bank. Menurut Muljono (1986) sebelum melaksanakan kegiatan menganalisa kredit, ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu pemilihan pendekatan yang akan dipakai dalam melaksanakan analisa kredit, proses pengumpulan informasi yang lengkap yang akan diperlukan dalam kegiatan suatu analisa kredit dan penerapan titik kritis suatu proyek.

Pendekatan yang dipergunakan Muljono (1986) dalam melakukan analisa kredit adalah pendekatan jaminan (*collateral approach*), pendekatan karakter (*character approach*), pendekatan kemampuan pelunasan atas kredit yang diberikan (*repayment approach*), pendekatan tingkat keterlaksanaan proyek usaha calon debitur (*feasibility approach*) dan pendekatan bank pembangunan (*development bank approach*). Siamat (1993) menyebutkan bahwa penilaian kredit menggunakan 5C plus 1C yaitu

Character, Capacity, Collateral, Condition of Economic dan Constraints. *Character* berkaitan dengan integritas dari calon debitur yang akan menentukan *willingness to pay* atau kemauan membayar kembali nasabah atas kredit yang telah dinikmati. *Capacity* yaitu kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban-kewajibannya yang meliputi pokok pinjaman dan bunga. Unsur unsur untuk menilai *capacity* nasabah adalah proyeksi arus kas, proyeksi laporan keuangan, pusat informasi kredit, kemampuan manajemen, kemampuan pemasaran, kemampuan teknis dan kewajiban-kewajiban kepada pihak lainnya. *Capital* atau modal berkaitan dengan nilai kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur yang biasanya diukur dari modal sendiri atau *networth* yaitu total aktiva dikurangi total kewajiban. *Collateral* adalah setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari Bank. *Condition of Economic* adalah keadaan perekonomian secara umum dimana perusahaan tersebut beroperasi. *Constraints* merupakan faktor hambatan dan keterbatasan yang dapat timbul dalam perkreditan.

Lebih lanjut Siamat (1993) menyebutkan bahwa aspek-aspek penilaian/analisa kredit mencakup aspek pemasaran, manajemen, teknis, keuangan, hukum dan sosial ekonomi. Menurut Yusuf (2000), analisa kredit terdiri dari analisa terhadap dua golongan data atau informasi yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif meliputi analisa yang didasarkan pada laporan keuangan dan data kualitatif yang terdiri dari data internal yaitu manajemen, organisasi, perusahaan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, sistem informasi, teknologi dan data eksternal terdiri dari siklus atau konjungtur ekonomi, perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, fluktuasi kurs dan analisa persaingan industri.

2.1.11. Kualitas Kredit

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.7/5/PBI/2005 tentang penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, bahwa kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yaitu prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur dan kemampuan membayar. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, dan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Penilaian terhadap kinerja debitur meliputi penilaian terhadap komponen-komponen perolehan laba, struktur permodalan, arus kas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap kemampuan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen ketepatan pembayaran pokok dan bunga, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur, kelengkapan dokumentasi kredit, kepatuhan terhadap perjanjian kredit, kesesuaian penggunaan dana dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Berdasarkan penilaian tersebut di atas, kualitas kredit ditetapkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan atau Macet. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini, untuk Usaha Kecil dengan plafon sampai dengan Rp 500 juta, kualitas kredit hanya ditentukan oleh ketepatan pembayaran pokok dan bunga sehingga ketentuan kualitas kredit digolongkan menjadi :

1. Lancar (kolektibilitas 1), pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.

2. Dalam Perhatian Khusus (kolektibilitas 2), terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari dan jarang mengalami cerukan.
3. Kurang Lancar (kolektibilitas 3), terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 hari, terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
4. Diragukan (kolektibilitas 4), terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
5. Macet (kolektibilitas 5), terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.

Dalam perkembangannya, tidak hanya kredit dengan plafon maksimal Rp 500 juta yang hanya dilihat dari ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga, namun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada debitur Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan jumlah lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 20 milyar bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut memiliki predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk risiko kredit "sangat memadai" (*strong*), memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling kurang 3 (PK-3). Lebih dari Rp 500 juta

sampai dengan Rp10 milyar bagi Bank yang yang memenuhi kriteria sebagai berikut memiliki predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit “dapat diandalkan” (*acceptable*), memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling kurang 3 (PK-3). Kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp. 1 milyar.

2.1.12. Perilaku Penawaran Kredit

Bank memiliki fungsi intermediasi yang menjembatani kepentingan pihak yang kelebihan dana (penyimpan dana atau kreditor) dan pihak yang membutuhkan dana (peminjam dana atau debitur). Pihak-pihak yang kelebihan dana, baik perseorangan, badan usaha, yayasan, maupun lembaga pemerintah dapat menyimpan kelebihan dananya di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan, ataupun deposito berjangka sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya (Suseno dan Piter A., 2003:6). Sementara itu pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana akan mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keputusan bank umum untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat. Lebih lanjut Melitz dan Pardue (1973) dalam Insukindro (1995) merumuskan model penawaran kredit oleh sistem perbankan sebagai berikut:

$$SK = g(S, ic, ib, BD) \dots\dots (2.1)$$

Keterangan:

SK = jumlah kredit yang ditawarkan oleh bank

S = kendala-kendala yang dihadapi bank seperti tingkat cadangan bank atau ketentuan mengenai nisbah cadangan wajib

ic = tingkat suku bunga kredit bank

ib = biaya oportunitas meminjamkan uang

BD = biaya deposito bank

Model di atas selanjutnya disempurnakan oleh Perry Warjiyo (2004), yang memaparkan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang secara implisit beranggapan bahwa semua dana yang dimobilisasi perbankan dari masyarakat dalam bentuk uang beredar (M1, M2) digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit perbankan. Dalam kenyataannya menurut Perry Warjiyo (2004), anggapan seperti itu tidak selamanya benar. Selain dana yang tersedia (DPK), perilaku penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri, seperti permodalan (CAR), jumlah kredit macet (NPL), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Dengan demikian, dapat dinyatakan dalam suatu bentuk hubungan fungsi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{KS} &= f(\text{DPK, prospek usaha debitur, kondisi perbankan itu sendiri}) \\ &= f(\text{DPK, prospek usaha debitur, CAR, NPL, LDR}) \dots \dots \dots (2.2) \end{aligned}$$

Keterangan:

KS = kredit yang ditawarkan perbankan

DPK = Dana Pihak Ketiga

Kondisi perbankan terdiri atas CAR = *Capital Adequacy Ratio*, NPL = *Non Performing Loan*, LDR = *Loan to Deposit Ratio*

2.1.13. Regresi Logistik

Menurut Kuncoro (2003), sebagai alat statistik, regresi bermanfaat dalam menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa jauh variasi perubahan *variable* dependen mampu dijelaskan oleh seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model ?
2. Manakah diantara variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen ?

3. Apakah dengan dimasukkannya tambahan satu variabel independen dapat memperbaiki prediksi terhadap variabel dependen ?
4. Apakah prediksi terhadap variabel dependen dari sejumlah variabel independen lebih baik dibanding kombinasi variabel independen yang lain?
5. Apakah penambahan *sample* (observasi) akan meningkatkan daya prediksi model ?

Model regresi yang digunakan tergantung dari peubah respon yang digunakan. Peubah respon dapat berupa peubah kualitatif dan kuantitatif. Dalam regresi logistik, hasil observasi peubah respon Y yang berskala biner, diklasifikasikan menjadi dua yaitu lancar dan tidak lancar atau bias juga ditulis dengan dua nilai yaitu $Y = 1$ dan $Y = 0$ sehingga mengikuti sebaran Bernoulli dengan parameter μ_i dan fungsi sebaran peluang :

$$f(Y = y_i) = \pi_i^{y_i} (1 - \pi_i)^{1-y_i} \dots\dots\dots (1)$$

dimana $y_i \in [0,1]$ dan π_i adalah peluang kejadian ke-1 bernilai $y=1$. Sebaran ini termasuk keluarga sebaran eksponen. Jika fungsi hubung yang digunakan adalah fungsi hubung logit, maka sebaran peluang yang digunakan adalah sebaran logistik yaitu (Mc Cullagh dan Nelder, 1989) :

$$\pi_j = \frac{e^{g(x)}}{1 + e^{g(x)}}$$

di mana diperoleh fungsi :

$$g(x) = \ln [\pi_j / 1 - \pi_j]$$

dengan : $g(x) = \beta_0 + \beta_1 + X_j \beta_1 + \dots + \beta_p X_p$ dan $j = 1,2,3 \dots n \dots\dots\dots (2)$

Pendugaan β_i , dilakukan dengan menggunakan metode penduga kemungkinan maksimum (*maximum likelihood*). Cox (1970) mengatakan bahwa ukuran contoh besar ($n > 10(p + 1)$), penduga kemungkinan maksimum merupakan penduga yang konsisten dan efisien, di mana p adalah jumlah peubah penjelas.

Jika antara pengamatan yang satu dengan lain diasumsikan bebas, maka fungsi kemungkinan maksimumnya adalah (Holmer dan Lemeshow, 1989) :

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^n f(y = y_i | x_i) \dots\dots\dots (3)$$

Parameter β_i diduga dengan memaksimumkan persamaannya.

Untuk memudahkan perhitungan, maka dilakukan pendekatan logaritma, sehingga disebut sebagai fungsi *log* kemungkinan (*log likelihood*) sebagai berikut (Hosmer dan Lemeshow, 1989) :

$$L(\beta) = \ln(l(\beta)) \text{ atau}$$

$$L(\beta) = \sum_{i=1}^n [y_i \ln \pi_i + (1-y_i) \ln (1-\pi_i)] \dots\dots\dots (4)$$

dimana dugaan β_i dapat diperoleh dengan membuat turunan pertama $L(\beta)$ terhadap β_i dengan $i = 1, 2, 3, \dots, p$. Secara teknis, karena π_i tidak linier dalam β , maka penduga kemungkinan maksimum untuk β_i dihitung dari proses iterasi dengan menggunakan algoritma *Iteratively Reweighted Least Square* (IRLS).

2.2. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan kerangka berfikir dalam penelitian yang akan dilakukan, diperlukan informasi yang relevan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan khususnya berhubungan dengan penelitian sebelumnya. Informasi ini sangat penting

untuk dijadikan dasar penelitian kita sehingga penelitian kita akan menjadi lebih lengkap, unik dan relevan dengan penelitian sebelumnya.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya adalah :

1. Hasil penelitian Harmanta dan Ekananda (2005) menyimpulkan bahwa penawaran kredit merupakan formula dari kapasitas kredit (*lending capacity*) bank umum, suku bunga kredit bank umum, suku bunga SBI, NPLs, dan variabel *dummy* sebelum dan setelah krisis tahun 1997. Dalam fungsi penawaran kredit tersebut seluruh variabel (kecuali variabel *dummy* krisis) secara statistik juga signifikan mempengaruhi penawaran kredit. Seluruh koefisien variabel bebas mempunyai tanda (*sign*) sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penelitian, yaitu tanda (hubungan) positif pada koefisien variabel kapasitas kredit dan variabel suku bunga kredit bank umum; tanda negatif pada koefisien variabel suku bunga SBI, NPLs, dan variabel *dummy*.
2. Rosadi (2004), menyatakan bahwa tingkat kelancaran pembayaran ditentukan oleh beberapa faktor yang digolongkan dalam karakter, modal, kemampuan, jaminan dan kondisi ekonomi. Rosadi menyimpulkan dari penelitiannya bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi analisa kredit pengusaha kecil diantaranya adalah latar belakang pendidikan, jumlah pinjaman yang diterima, nisbah pinjaman per transaksi jaminan, sektor industri, pinjaman, nisbah angsuran per penerima tunai akan menentukan pengusaha kecil dalam pembayaran pinjaman. Sedangkan faktor yang tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat kelancaran pembayaran pinjaman adalah faktor umur, jumlah jiwa dalam keluarga dan status kepemilikan jaminan. Untuk menganalisa kredit yang diberikan kepada pengusaha

Universitas Indonesia

kecil agar tidak terjadi macet, maka harus memperhatikan faktor karakter, modal, kemampuan dan kondisi ekonomi, sedangkan faktor jaminan yang diwakili dengan *variable* status kepemilikan jaminan dan nisbah jaminan dengan taksasi jaminan tidak memberikan pengaruh terhadap kelancaran pembayaran pinjaman sehingga model analisa kredit dengan menggunakan 5C tidak cocok diterapkan untuk menganalisa kredit pengusaha kecil melainkan hanya 4C yang tepat untuk menganalisa kredit pada pengusaha kecil.

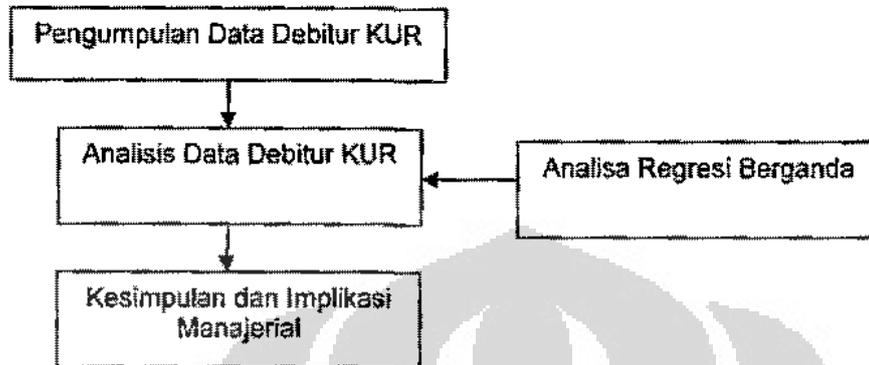
3. Arisani (2005), menyatakan bahwa untuk menganalisa kredit bagi usaha kecil digunakan analisa WISDOM yang terdiri dari *Watak, Income, Saving Power, Demand Drive, Opportunity* dan *Monitoring dan Manajemen*. *Watak* seseorang dapat diketahui dengan mengetahui karakteristik orang tersebut. Informasi yang perlu diketahui diantaranya adalah nama, usia dan pendidikan terakhir. *Income* merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha dan cash flow. *Saving Power* untuk mengetahui uang tunai yang dimiliki dari sumbernya. Informasi yang perlu diketahui adalah pengeluaran per hari, keuntungan yang diperoleh, apakah memiliki tabungan, gaya hidup, biaya listrik, telepon dan air per bulan. *Demand Drive* adalah jumlah uang yang dipinjam yang disesuaikan dengan kebutuhan. *Opportunity* adalah bagaimana peluang usaha untuk memperoleh penghasilan yang dapat dimanfaatkan untuk melunasi kredit. *Monitoring dan manajemen* adalah bagaimana bisnis dikelola dan bagaimana pengawasannya dengan jumlah tenaga kerja dan gaji tenaga kerja.

4. Kristijadi (2006), dari hasil penelitian yang dilakukan dihasilkan bahwa parameter utama untuk kredit modal kerja adalah sektor ekonomi, lama usaha, aspek pemasaran, aspek manajemen, kinerja keuangan dan aspek jaminan. Parameter kredit investasi hampir sama dengan parameter kredit modal kerja namun untuk kredit investasi selain aspek pemasaran juga harus dinilai pada aspek produksinya. Parameter kredit konsumtif sama dengan kredit investasi, hanya perlu dibedakan pada indikator pengukurannya karena karakteristik individu dengan badan usaha jauh berbeda. Misalkan pada aspek produksi pada kredit investasi perlu mengukur indikator kapasitas produksi, kualitas mesin, kualitas produk, tenaga kerja, sedangkan untuk kredit konsumtif aspek produksi diukur dengan indikator usia, profesi, fasilitas yang dimiliki dan kegiatan sampingan.
5. Sugiardi (2003) telah melakukan penelitian tentang analisis model manajemen risiko kredit. Penelitian dilakukan terhadap portofolio kredit di cabang bogor pada tahun 2001 dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif), *Default Probability Model* dan Pola Asuransi.

2.3. Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan pola pikir yang jelas atas penelitian yang akan dilakukan, diperlukan kerangka pemikiran sehingga penelitian akan tetap fokus pada tujuan awal dan tahapan penelitian akan menjadi jelas.

Kerangka pemikiran untuk penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pada tahap awal akan dilakukan pengumpulan data mengenai debitur KUR, seperti plafond kredit, colltibility, BDR/NPL. Hasil inputan ini kemudian dilakukan analisa Selanjutnya untuk mengetahui dugaan variabel yang berpengaruh terhadap perilaku penawaran kredit dan kualitas kredit dilakukan analisa time series dan analisa regresi berganda Tahap selanjutnya adalah memberikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang ada dan memberikan masukan berupa implikasi manajerial terhadap produk Kredit Usaha Rakyat.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Bank Bukopin merupakan bank yang mencakup segala kegiatan bank umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan dengan tujuan utama memperhatikan dan melayani kepentingan gerakan koperasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku. Sampai dengan tahun 2007 (Annual Report 2007)

Secara garis besar ada tiga cara dasar untuk mendirikan UKM, dimana masing-masing memberikan kesempatan dan tantangan pada pemiliknya, dan masing-masing membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan pengontrolan supaya berhasil. Ketiga cara tersebut adalah : (Steinhoff, dan Burgess, 1993, p.11)

- a. Memulai suatu usaha yang benar-benar baru dimana pengusaha memerlukan ide atau konsep dan menciptakan sebuah bisnis baru. Cara ini sulit tapi sangat menguntungkan bila dapat dijalankan.
- b. Mempelajari bisnis yang telah ada. Dalam metode ini bisnis yang sudah ada bisa dievaluasi dengan memeriksa catatan keuangan, mencari informasi dari pekerja-pekerjanya, pemasok bahan baku, serta pelanggannya.
- c. *Franchise*, dimana usahawan memperoleh pengalaman kerja dari induk perusahaan beserta nama, logo, teknik produksi, dan metode pelatihan.

Skema kredit di Bank Bukopin digolongkan sebagai berikut:

1. Kriteria penerima kredit

- a. Usaha Mikro (pengrajin, nelayan, petani, dan pedagang)

- b. **Usaha Kecil** dalam pengertian ini adalah pelaku usaha disektor pertanian, kelautan, perdagangan, perindustrian, jasa atau perkebunan dalam arti seluas-luasnya,
 - c. **Usaha Menengah dan Koperasi** dalam pengertian ini adalah pelaku usaha disektor pertanian, kelautan, perdagangan, perindustrian, jasa atau perkebunan dalam arti seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
2. **Kriteria penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKMK sebagai berikut:**
- a. Kredit/Pembiayaan baru, atau
 - b. Kredit/Pembiayaan perpanjangan yang masih dalam keadaan lancar (kolektibiliti 1) sesuai ketentuan Bank Indonesia dan belum pernah direstrukturisasi, atau
 - c. Kredit/Pembiayaan tambahan yang masih dalam keadaan lancar (kolektibiliti1) sesuai ketentuan Bank Indonesia dan belum pernah direstrukturisasi.
 - d. Kredit/Pembiayaan bukan hasil take over dari bank lain yang dibuktikan dengan hasil *Bank Checking*.
 - e. Penggunaan Kredit/Pembiayaan adalah untuk modal kerja atau investasi dan atau modal kerja, yang mendukung semua sektor ekonomi produktif dan layak untuk dibiayai.
3. **Struktur Kredit/Pembiayaan**
- a. Untuk Usaha Mikro, plafon Kredit/Pembiayaan yang dapat diberikan adalah diatas Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 100 juta

- b. Untuk Usaha Kecil, plafon Kredit/Pembiayaan yang dapat diberikan adalah lebih dari Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 2,5 milyar
- c. Untuk Usaha Menengah dan Koperasi, plafon Kredit/Pembiayaan yang dapat diberikan adalah lebih dari Rp. 2,5 milyar sampai dengan Rp. 10 milyar

4. Analisa Kelayakan

Menggunakan *Internal Credit Risk Rating (ICRR)* yaitu suatu alat untuk melakukan analisa kelayakan, mengidentifikasi dan mengukur risiko atas Kredit/Pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank.

5. Penggunaan Kredit untuk modal kerja atau untuk investasi dan atau modal kerja.

6. *Setting* (bentuk) Kredit

Setting (bentuk) Kredit harus dalam bentuk *aflopen/installment* (plafond menurun) dengan ketentuan setiap akhir tahun terdapat penurunan plafond Kredit/Pembiayaan sesuai dengan analisa kelayakan dari Bank.

7. Jangka waktu Kredit

- a. Untuk Kredit modal kerja maksimal tiga tahun.
- b. Untuk kredit investasi maksimal lima tahun.

8. Suku bunga/Bagi hasil/Nisbah

Tingkat suku bunga/bagi hasil/nisbah sebesar 14- 16% efektif per-tahun.

3.1 Lokasi dan Waktu

Penelitian dilakukan di PT. Bank Bukopin Tbk Jalan MT Haryono Kav. 50-51 Jakarta khususnya pada Direktorat Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dengan jadwal penelitian mulai pertengahan bulan Januari 2008 sampai dengan

Universitas Indonesia

Februari 2009. PT. Bank Bukopin Tbk dipilih sebagai lokasi penelitian karena PT. Bank Bukopin Tbk sebagai salah satu bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai bank pelaksana KUR diantara lima bank lainnya dan merupakan bank yang sejak berdirinya memiliki misi didalam pengembangan usaha kecil dan mikro. Sehingga PT. Bank Bukopin Tbk sangat cocok untuk memenuhi tujuan penelitian.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah studi kasus terhadap KUR dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta untuk seluruh sector PT. Bank Bukopin Tbk. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif, analisa regresi berganda.

3.3 Data Yang Diperlukan dan Sumbernya

Data berasal dari data hasil AS 400 dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta yang diambil dari *database* internal Bank Bukopin untuk KUR.

Data sekunder berasal dari data yang terdapat di dalam *Bukisys* yaitu suatu *system* database yang menyimpan informasi kredit debitur di Bank Bukopin. Data yang diambil adalah data debitur pada bulan Januari 2008 sampai dengan Februari 2009. Data sekunder lainnya berasal dari *annual report* Bank Bukopin dan data dari Bank Indonesia serta data pendukung lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Informasi

Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Data debitur *Bukisys* dengan plafon sampai dengan Rp 500 juta dan hanya data debitur KUR yang cocok yang akan diambil sebagai bahan analisa di dalam penelitian ini.
2. Setelah mendapatkan nama debitur dan plafond yang akan dianalisa, selanjutnya adalah mengambil dan mengumpulkan data hasil perhitungan mengenai plafond kredit, jumlah debitur, data *colectibility* dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta hanya untuk produk KUR.
3. Disamping itu, data dan informasi juga diambil dari studi pustaka yang relevan dengan penelitian ini baik dari jurnal, tesis dan buku untuk memperkuat data yang ada.
4. Data debitur yang diambil adalah debitur yang terakhir melakukan pencairan di bulan Januari 2008 hingga pada posisi Februari 2009 sudah dapat diketahui kualitas kreditnya.

3.5 Teknik Pengambilan Contoh

Contoh yang diambil adalah seluruh data debitur KUR selama periode Januari 2008 – Februari 2009 dengan plafond kredit maksimal Rp 500 juta.

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dan analisa data dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi berganda. Teori regresi berganda digunakan untuk menguji adanya pengaruh variabel *Cost of fund*, *Overhead Cost*, *Bad Debt Ratio* (BDR) dan *Non Performing Loan* (NPL) terhadap perilaku penawaran KUR baik kredit investasi dan kredit modal kerja yang

dikeluarkan Bank Bukopin kepada sektor UKM di Indonesia dengan menggunakan model persamaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. $K_{KUR} = \beta_0 + \beta_1 \text{Cof}$
2. $K_{KUR} = \beta_0 + \beta_1 \text{OH}$
3. $K_{KUR} = \beta_0 + \beta_1 \text{BDR}$
4. $K_{KUR} = \beta_0 + \beta_1 \text{NPL}$

K_{KUR} = Jumlah kredit KUR sektor UKM pada Bank Bukopin (Januari 2008 – Februari 2009).

Cof_i = Cost of Fund pada Bank Bukopin (Januari 2008 – Februari 2009).

OH_i = Overhead Cost pada Bank Bukopin (Januari 2008 – Februari 2009).

BDR_i = *Bad Debt Ratio* untuk KUR pada Bank Bukopin (Januari 2008 – Februari 2009).

NPL_i = *Non Performing Loans* untuk KUR Bank Bukopin (Januari 2008 – Februari 2009).

U_i = Tingkat kesalahan atau tingkat gangguan

Selanjutnya koefisien regresi yang didapat diuji dengan uji koefisien regresi parsial (t test) dan uji koefisien regresi serempak (F test). Mengingat penelitian ini menggunakan data menurut deret waktu (*time series*).

BAB 4

PROFIL PERUSAHAAN

4.1. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank Bukopin Tbk

Annual Report Bank Bukopin (2007). PT. Bank Bukopin Tbk didirikan pada tanggal 10 Juli 1970 dengan bentuk badan hukum Koperasi yang didirikan oleh 8 (delapan) induk koperasi yaitu : INKOPAD (Induk Koperasi Angkatan Darat), INKOPAU (Induk Koperasi Angkatan Udara), INKOPAL (Induk Koperasi Angkatan Laut), INKOPPOL (Induk Koperasi Kepolisian Republik Indonesia), INKOVERI (Induk Koperasi Veteran Republik Indonesia), IKPI (Induk Koperasi Perikanan Indonesia), IKPN (Induk Koperasi Pegawai Negeri) dan GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia).

Guna memperkokoh landasan usaha bank-bank koperasi yang pada saat itu tersebar di daerah-daerah serta guna menopang kegiatan usaha perkoperasian secara profesional di seluruh wilayah Indonesia, pada tahun 1985 seluruh bank berbadan hukum koperasi di daerah merger kedalam Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN).

Pada tahun 1989 untuk lebih menunjukkan citra BUKOPIN sebagai sebuah bank, dilakukan perubahan nama menjadi Bank Bukopin. Sebagai sebuah bank, usaha Bank Bukopin terus berkembang dan tidak terlepas dari regulasi yang dikeluarkan baik oleh Bank Indonesia maupun instansi terkait lainnya. Adanya kebutuhan terhadap struktur permodalan dan juga untuk memenuhi kebijakan moneter Oktober 1988, yang intinya meminta setiap lembaga perbankan mampu meningkatkan likuiditas permodalan agar dapat menjamin segi operasionalnya, maka melalui keputusan Rapat Anggota Khusus, dilakukan perubahan status badan hukum dari

koperasi menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 29 Juni 1993 dengan nama PT. Bank Bukopin.

Dalam PT. Bank Bukopin, 2.787 Koperasi eks anggota Bank Bukopin berubah menjadi pemegang saham yang diwakili oleh koperasi pendiri dan beberapa koperasi lainnya. Pada tanggal 1 Januari 1997 Bank Bukopin memperoleh ijin sebagai bank devisa yang memberikan status dan kesempatan usaha bank yang lebih luas untuk dapat berkibrah dalam cakrawala perbankan internasional.

Pertengahan tahun 1997 krisis moneter melanda Indonesia yang berlanjut menjadi krisis ekonomi dan berdampak pada dunia perbankan. Bank Bukopin tidak luput dari dampak tersebut yang mengakibatkan Bank Bukopin harus mengikuti program Rekapitalisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun 1998. Selama dalam program Rekapitalisasi tersebut, Bank Bukopin tetap dapat tumbuh melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Usaha (*Performance Plan*).

Dengan kinerja yang baik tersebut, pada tahun 2001 Bank Bukopin berhasil menyelesaikan program Rekapitalisasi sebelum batas waktu yang ditetapkan Pemerintah serta menjadi bank pertama yang keluar dari program tersebut. Selanjutnya, untuk dapat menyerap potensi pasar bisnis syariah, sejak Tahun 2001 Bank Bukopin juga telah memiliki unit usaha Syariah dan membuka Cabang Syariah pertama di Jakarta.

Sejak beroperasi lebih dari tiga dasawarsa yang lalu, Bank Bukopin terus mengembangkan diri untuk menjadi bank yang memahami kebutuhan nasabahnya dan memberikan solusi dengan manfaat yang nyata. Salah satunya dengan terus mengembangkan segmentasi usaha yang semakin terfokus.

Dengan fokus pada segmentasi usaha yang dikuasainya, Bank Bukopin dapat mengenal karakteristik masing-masing segmen sehingga mampu menggali dan

mengembangkan potensi pasarnya. Segmen usaha ini terdiri dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, konsumen dan komersial yang telah ditangani sejak awal; serta secara selektif melayani skala bisnis besar sesuai sektor usaha yang ditetapkan. Kesemuanya dapat dilayani dengan sistem perbankan konvensional maupun syariah.

Layanan perbankan kepada nasabah diberikan secara komprehensif melalui jaringan yang terhubung secara nasional maupun internasional; produk yang beragam serta mutu pelayanan dengan standar yang tinggi. Aliansi strategis dengan perbankan nasional dan internasional serta lembaga-lembaga lainnya terus memberikan efisiensi usaha dalam pengembangan jaringan pelayanan.

Hasil yang dicapai berupa *integrated service network* juga memberikan kemudahan dan manfaat nyata bagi nasabah. Jaringan layanan Bank Bukopin menyebar dalam berbagai bentuk titik layanan. Sampai dengan Desember 2004 jaringan layanan Bank Bukopin terdiri dari 261 kantor, lebih dari 8.800 ATM di seluruh Nusantara, 500.000 lebih ATM berlogo Visa, Visa Electron dan PLUS di seluruh dunia, internet banking, sms banking, call center, 301 Jaringan Swamitra, serta moda layanan lainnya. *Integrated Service Network* ini didukung oleh teknologi perbankan yang andal dan terkini yang dikembangkan sendiri oleh sumber daya manusia yang kompeten. Sejalan dengan tuntutan industri perbankan dunia, operasional usaha Bank Bukopin juga selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang terukur.

Dengan langkah-langkah ini Bank Bukopin dapat menjaga operasional bank yang sehat dan dapat terus tumbuh untuk terus menggali potensi pasar dalam era perdagangan dan ekonomi yang terbuka. Pada bulan Juli 2006, Bank Bukopin

mengukuhkan sebagai Bank dengan status terbuka (tbk) dengan menjual kepemilikan saham ke masyarakat umum dan terdaftar dalam Bursa Efek.

4.2. Visi, Misi dan Nilai-nilai PT. Bank Bukopin Tbk

4.2.1 Visi

Menjadi bank yang terpercaya dalam pelayanan jasa keuangan.

4.2.2 Misi

Memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, turut berperan dalam pengembangan koperasi dan usaha kecil, serta meningkatkan nilai tambah investasi pemegang saham dan kesejahteraan karyawan.

4.3. Nilai Perusahaan (*Corporate Value*)

Nilai-nilai perusahaan harus dikembangkan untuk menunjang strategi perusahaan dalam mencapai Visi dan menjalankan Misi. Nilai-nilai perusahaan yang harus dikembangkan dan menjadi ciri utama di dalam perusahaan adalah nilai-nilai SIMPATIK, yaitu:

1. **Service.** Seluruh jajaran Bank Bukopin harus memberikan *service* terbaik kepada nasabah, baik nasabah eksternal maupun internal.
2. **Integritas.** Seluruh jajaran Bank Bukopin harus memiliki etika, serta berpikir, berkata dan bertindak secara jujur dan benar dengan tidak merugikan perusahaan.
3. **Mutu.** Produk dan layanan yang dihasilkan harus bermutu tinggi berdasarkan standar perbankan internasional sehingga memberikan

- kepuasan kepada nasabah dan menjadikan nasabah loyal kepada Bank Bukopin.
4. **Produktif.** Seluruh jajaran Bank Bukopin harus optimal dalam produktifitas.
 5. **Akuntabilitas.** Seluruh jajaran Bank Bukopin harus dapat mempertanggung-jawabkan pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
 6. **Transparansi.** Seluruh jajaran Bank Bukopin harus transparan dalam setiap langkah dan proses penetapan kebijakan dan keputusan serta dapat dikaji secara terbuka oleh setiap pihak yang relevan.
 7. **Interdependensi.** Seluruh jajaran Bank Bukopin harus saling membantu dan bekerja sama sehingga membentuk kolaborasi dan menghasilkan sinergi positif.
 8. **Kompetensi.** Seluruh jajaran Bank Bukopin harus terus meningkatkan kemampuan, keahlian dan wawasan sehingga memiliki kompetensi dibidangnya.

4.4. Arah Pengembangan PT. Bank Bukopin Tbk

Pengembangan usaha Bank Bukopin diarahkan pada UMKM, konsumen dan komersial serta secara selektif melayani bisnis skala besar sesuai sektor usaha yang ditetapkan.

Bisnis yang diprioritaskan tersebut adalah untuk pembiayaan sektor-sektor produktif seperti perdagangan, transportasi, telekomunikasi, gas dan energi, pendidikan, kesehatan, agrobisnis, serta pembiayaan kebutuhan konsumtif.

Dalam rangka mendukung arah pengembangan usaha tersebut di atas, perlu didukung dengan:

1. Pengembangan Jaringan Layanan.

Ditekankan pada titik-titik wilayah yang potensial dan yang selama ini telah menjadi kekuatan bisnis Bank Bukopin.

2. Penetapan Standarisasi Produk/layanan

Diperlukan untuk mendukung terciptanya layanan yang efektif dan efisien sesuai dengan *target market* yang telah ditetapkan.

3. Pengembangan TSI

Sesuai dengan kebutuhan perkembangan bisnis untuk menciptakan daya saing, khususnya dalam pengolahan informasi dan penyajian layanan yang tepat dan cepat.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dilakukan baik dari sisi kuantitas untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pengembangan bisnis maupun dari sisi kualitas untuk menjamin terciptanya kesinambungan pengembangan produk perbankan yang bermutu tinggi.

5. Penguatan Struktur Permodalan

Peningkatan permodalan Bank Bukopin dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain *Initial Public Offering (IPO)*, *Right Issue*, melalui *Strategic Investor* dan melalui strategi merger atau akuisisi yang akan dilakukan selama kurun waktu enam tahun ke depan.

UMKM yang akan dibangun mempunyai keunggulan dan berbeda dengan bank pesaing, baik dari segi kecepatan, keragaman maupun keakurasian dalam pelayanan.

Strategi pengembangan ini diharapkan mampu menciptakan kinerja Bank Bukopin secara lebih baik dan distribusi risiko terbagi secara merata pada seluruh segmentasi usaha yang ada. Dengan demikian adanya kejenuhan usaha pada suatu segmentasi usaha tertentu akan ditutupi oleh segmentasi usaha lainnya.

4.5. Kebijakan Umum

Untuk dapat mewujudkan sasaran usaha yang telah ditetapkan, kebijakan umum yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penetapan langkah-langkah strategis adalah sebagai berikut :

1. Memfokuskan diri kepada tiga segmen pasar yaitu, segmen UMKM dan Koperasi, segmen konsumen dan segmen komersial.
2. Untuk mencapai sasaran bisnis, akan dilakukan pengembangan organisasi sebagai berikut :
 - a. Pembentukan 2 Direktorat baru yaitu Direktorat Mikro serta Direktorat SDM dan Umum pada tahun 2008.
 - b. Pembentukan koordinator wilayah yang terdiri dari koordinator wilayah bisnis, koordinator wilayah operasional, dan koordinator audit interen di cabang.
 - c. Mengembangkan anak perusahaan *multifinance* dan membentuk lembaga keuangan non bank lainnya antara lain Asuransi dan Sekuritas.
 - d. Pembentukan anak perusahaan perbankan Syariah pada tahun 2009.
3. Dalam mencapai sasaran usaha pada setiap segmentasi tersebut diatas, didasarkan kepada *unique selling proposition* masing-masing segmen sebagai berikut :

- a. Mengembangkan pembiayaan pada segmen usaha kecil dan menengah dengan menitikberatkan pembiayaan pola kemitraan.
 - b. Mengembangkan pembiayaan segmen komersial pada BUMN dan Institusi Pemerintah lainnya serta meningkatkan pendapatan melalui *fee base*.
 - c. Mengembangkan segmen konsumen sebagai basis penghimpunan dana murah dan berbagai jenis layanan transaksi kebutuhan nasabah perorangan.
 - d. Menjadi bank utama dalam pembiayaan pengadaan komoditi.
 - e. Mengembangkan jenis pembiayaan dengan pola Syariah.
 - f. Mengembangkan pembiayaan *micro banking* dengan pola Swamitra dan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro lainnya.
4. Penerapan *Product Management Approach* dalam peningkatan volume dan kualitas bisnis.
 5. Peningkatan standar layanan pada seluruh kegiatan bank.
 6. Mengoptimalkan produktifitas jaringan kantor konvensional termasuk membuka cabang/*representative office* di luar negeri serta mengembangkan fitur jaringan *electronic banking*.
 7. Menerapkan teknologi sistem informasi dalam setiap aktifitas bisnis, operasional bank dan pelayanan nasabah.
 8. Meningkatkan profesionalisme, produktifitas, dan kesejahteraan sumber daya manusia.
 9. Mengembangkan *support system* yang sesuai dengan karakteristik segmen bisnis masing-masing.

10. Menerapkan Manajemen Risiko dan *Good Corporate Governance* pada setiap aktifitas bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.6. Strategi dan Kebijakan Pengembangan UKMK.

Untuk meningkatkan daya saing dalam pengembangan UKMK, Bank Bukopin menciptakan strategi dan memberikan perhatian secara khusus terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. **Peningkatan *Direct Marketing*.** Untuk lebih meningkatkan akselerasi pemberian kredit kepada UKMK, ditempuh strategi berupa peningkatan pembiayaan secara langsung kepada calon debitur dengan dukungan kebijakan yang lebih fokus terhadap segmentasi dan wilayah usaha pada tiap-tiap area dan cabang.
2. **Kemitraan.** Bank Bukopin mengembangkan kerjasama dengan berbagai instansi Pemerintah dan perusahaan swasta untuk mendapat akses kepada sejumlah besar UKMK yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga dengan kemitraan tersebut akan memudahkan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan.
3. **Pengembangan Produk.** Bank Bukopin memberikan kredit dengan proses yang sederhana dan didukung oleh sistem teknologi informasi untuk memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada para nasabahnya dan secara konsisten melakukan penyempurnaan produk kredit yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan nasabah dan tetap kompetitif.
4. **Aliansi Strategis.** Bank Bukopin melakukan pengembangan jaringan mitra bisnis melalui kerjasama dengan organisasi yang berhubungan dengan pengembangan UKMK seperti asosiasi profesi, pemerintah daerah, badan

usaha milik negara dan daerah. Bank Bukopin juga mengembangkan jaringan usahanya dengan membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan gerai-gerai baru di lokasi mitra strategis di seluruh Indonesia.

5. **Cross-selling** kepada Nasabah, *Supplier* dan Mitra Bisnisnya. Bank Bukopin bekerja sama dengan para nasabahnya dalam melakukan identifikasi nasabah, *supplier* dan mitra bisnis baru sehingga memungkinkan Perseroan untuk menawarkan produk dan jasa.

Untuk meningkatkan dan mengembangkan UKMK, Bank Bukopin menetapkan kebijakan secara intern dengan tujuan untuk lebih memfokuskan operasional bisnis Perseroan sehingga lebih terarah dan tepat sasaran. Diantara kebijakan tersebut adalah :

- a. **Kebijakan Standar Pertumbuhan Kinerja *Account Officer* (AO).** Kebijakan ini mengatur tentang standar pertumbuhan penyaluran kredit yang harus dicapai oleh AO dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
- b. **Kebijakan Segmentasi Bisnis.** Untuk lebih memfokuskan pembiayaan kepada UKMK agar lebih terarah dan tepat sasaran, Perseroan mengeluarkan kebijakan pengaturan segmentasi bisnis yang dapat dibiayai oleh grup bisnis. Kebijakan ini disesuaikan dengan potensi pasar dan potensi bisnis yang ada pada masing-masing wilayah grup bisnis.
- c. **Kebijakan Jumlah Minimum Tenaga *Marketing*.** Untuk mencapai target kuantitatif Perseroan per grup bisnis, ditetapkan kebijakan penetapan jumlah minimum tenaga marketing yang ada di grup bisnis. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu bisnis dalam melakukan

ekspansi dan jangkauan pemasaran terhadap wilayah usaha masing-masing.

- d. **Kebijakan Skala Penanganan Kredit.** Untuk menyesuaikan antara kemampuan tenaga marketing dengan skala usaha yang akan ditangani, ditetapkan kebijakan skala penanganan kredit sehingga tenaga marketing akan mampu melayani kepentingan bisnis.
- e. **Kebijakan Kriteria Debitur Utama.** Untuk mendapatkan debitur yang potensial, layak dan tepat sasaran, ditetapkan adanya kriteria debitur utama sehingga tenaga marketing dapat menjangkau debitur yang diharapkan akan loyal dan memberikan keuntungan bagi Bank Bukopin.
- f. **Kebijakan Wilayah Bisnis Cabang.** Dalam rangka efisiensi, pelaksanaan monitoring dan penajaman sasaran bisnis, Bank Bukopin mengeluarkan kebijakan wilayah bisnis bagi grup bisnis. Wilayah bisnis disesuaikan dengan kondisi, potensi dan sasaran yang ditetapkan sehingga grup bisnis lebih fokus dan dapat melakukan monitoring untuk kelancaran kreditnya.
- g. **Lain-lain.** Dalam melakukan pengembangan usaha kecil khususnya untuk membantu penyediaan agunan/jaminan, Bank Bukopin bekerjasama dengan Perusahaan Penjaminan diantaranya dengan PT Askriindo, Perum SPU, PT ASEI, PKPI baik dalam bentuk Penjaminan Kredit maupun Kontra Bank Garansi.

4.7. Produk Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Bukopin Tbk

Sejalan dengan semakin berkembangnya produk-produk yang ada di dunia perbankan, pemerintah dalam rangka memfokuskan diri pada sektor UKM yang

dianggap lebih tahan dalam menghadapi krisis, maka pemerintah berusaha mengerakkan sektor UKM dengan memberikan bantuan dalam bentuk kemudahan dalam pengajuan kredit pada perbankan. Saat ini KUR hanya dijalankan pada enam bank pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah. Sektor UKM memiliki kesulitan untuk mengakses kredit perbankan karena dianggap tidak *bankable*, salah satunya adalah kesulitan jaminan atau agunan. Maka produk ini dianggap dapat mendorong kinerja UKM dengan memberikan kemudahan dimana jaminan atau agunan yang diberikan hanya 30-40%. Tingkat suku bunga yang diberikan pun merupakan kesepakatan antara pemerintah dengan enam bank pelaksana yaitu berkisar 14-16%.

Berdasarkan publikasi Komite Nasional Keuangan Mikro Indonesia (Kompas 2 Juni 2008), posisi KUR yang direalisasikan hingga bulan Mei 2008 telah mencapai Rp. 6.1 triliun kepada 590 ribu debitur. Selama satu semester, ekspansi kredit dan penambahan debitur per bulan masing-masing sebesar Rp. 1 triliun dan 327 orang/unit usaha (lihat tabel). Angka pertumbuhan KUR tersebut memang masih berada dibawah kinerja kredit perbankan dan kredit UMKM secara nasional. Sedangkan *gearing ratio* penjaminan 6 kali dengan asumsi dana Rp. 1 triliun yang dikeluarkan oleh pemerintah digunakan semua untuk menjamin kredit KUR.

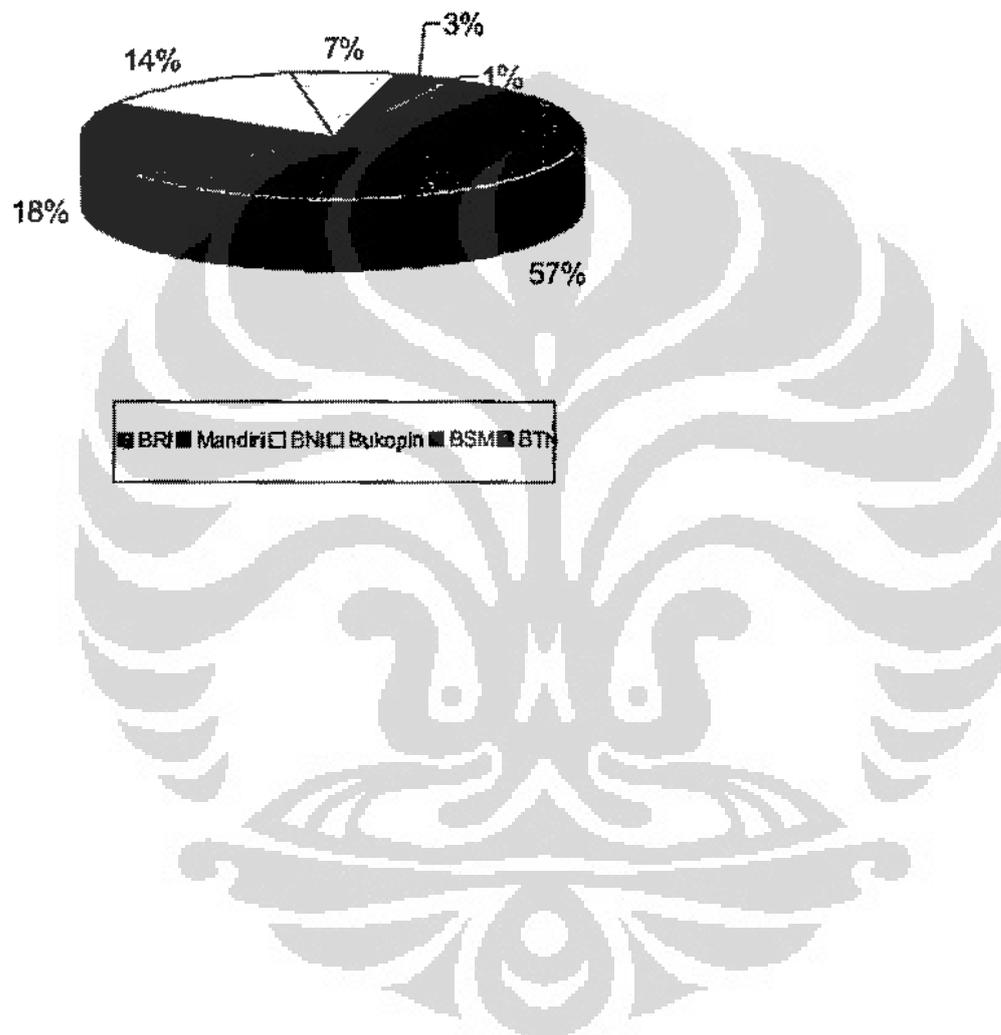
Tabel 4.1 Posisi 6 Bank Pelaksana KUR Bulan April dan Mei 2008

Bank	Kredit (Milyar Rp)	Debitur
BRI	2,918	402,634
Mandiri	943	33,110
BNI	711	6,147
Bukopin	342	950
BSM	177	353
BTN	59	353
Total April	5,150	443,547
Total Mei	6,100	590,000

Sumber: PKMI & CPR (Kompas 2 Juni 2008)

Dari 6 bank pelaksana KUR, Bank BRI merupakan penyalur terbesar kemudian diikuti oleh Bank Mandiri, BNI dan Bukopin, sedangkan bank-bank lainnya relatif kecil (lihat grafik).

Grafik 4.1 Pangsa Pasar 6 Bank Pelaksana KUR Posisi April 2008



BAB 5

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada metodologi penelitian dan tujuan dari penelitian ini, maka pembahasan meliputi hasil evaluasi kinerja penawaran kredit dengan nama produk KUR untuk jangka waktu kredit dari Januari 2008 – Februari 2009 menggunakan analisis deskriptif *Cost of fund (CoF)*, *Overhead Cost (O/H)*, *Bad Debt Ratio (BDR)* dan *Non Performing Loan (NPL)* yang berpengaruh terhadap tunggakan pinjaman dengan menggunakan analisis regresi logistik, dan memberikan saran penyempurnaan kebijakan pemberian pinjaman kepada sektor UKM.

Dari 301 sampel peminjam yang diamati dengan outstanding kredit sebesar Rp 95.333.810.188,- dengan pinjaman tertunggak sebesar Rp 18.702.508.400,-. Ada banyak penyebab menunggaknya anggota dalam mengembalikan pinjaman antara lain karena bisnis sepi, karakter anggota kurang baik, bangkrut, perencanaan bisnis tidak tepat, tagihan kepada pembeli/konsumen macet, bisnis gagal, *sidestreaming*, tertipu rekan bisnis, ganti usaha dan kemungkinan lainnya yaitu rendahnya *willingness to pay* dikarenakan dalam pengajuan KUR ini cukup menggunakan jaminan sebesar 30-40% dari plafond.

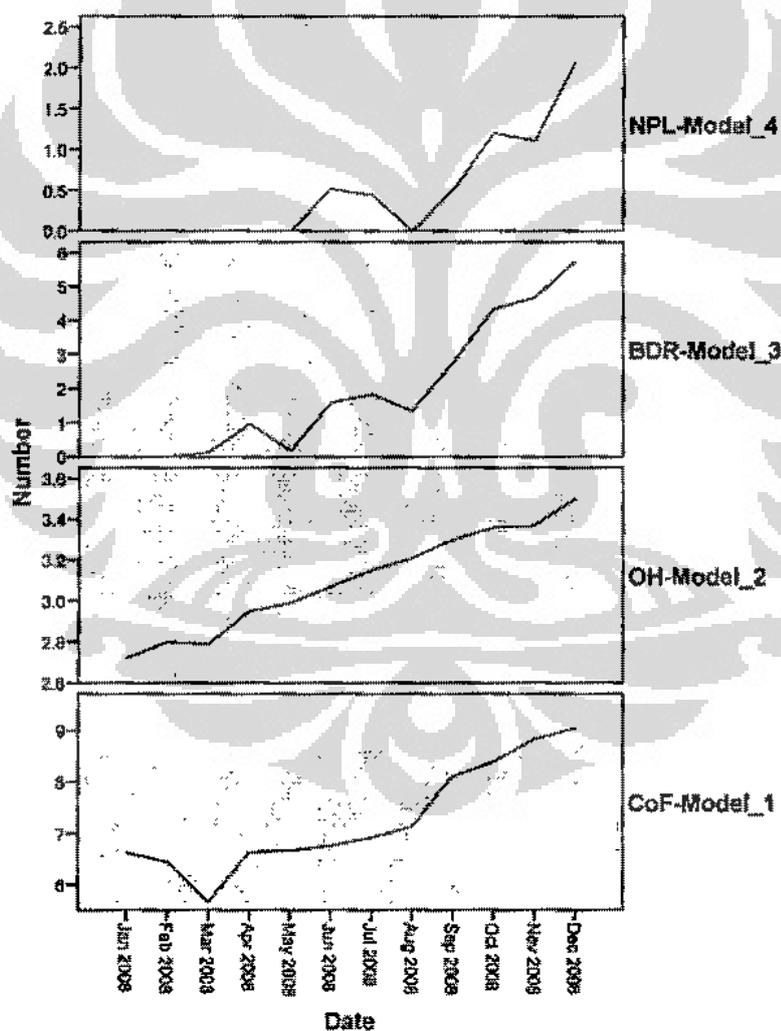
5.1. ANALISIS DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CoF	12	5.65	9.04	7.2675	1.06209
O/H	12	2.72	3.50	3.1008	.25603
BDR	12	.00	5.74	1.9667	1.99395
NPL	12	.00	2.07	.4867	.65256
Valid N (listwise)	12				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KYD	12	19202.09	24043.60	22209.23	1862.44414
GIRO	12	5569.31	8885.20	7167.9058	1119.69003
TABUNGAN	12	2777.91	3628.20	3073.0217	255.88448
DEPOSITO	12	16286.89	18064.35	17304.87	532.35884
DPK	12	25113.32	29592.34	27545.80	1426.18649
ASSET	12	30903.43	35436.40	33162.81	1567.84696
LABA	12	44.42	567.86	313.5108	176.65524
BOPO	12	82.11	84.45	83.1058	.76325
LDR	12	56.62	95.77	80.4708	8.81765
ROA	12	1.53	1.80	1.6783	.09944
NPL	12	.00	3.82	2.9325	1.38483
Valid N (listwise)	12				



Berdasarkan pada grafik di atas terlihat bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara waktu dengan keempat variabel yang dianalisis, yaitu CoF, O/H, BDR, dan

NPL dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa terdapat kecenderungan dari keempat variabel tersebut untuk terus meningkat sepanjang waktu.

Correlations

		MONTH, period 12
CoF	Pearson Correlation	.902**
	Sig. (2-tailed)	.000
O/H	Pearson Correlation	.994**
	Sig. (2-tailed)	.000
BDR	Pearson Correlation	.932**
	Sig. (2-tailed)	.000
NPL	Pearson Correlation	.829**
	Sig. (2-tailed)	.001

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Tabel di atas menunjukkan hasil analisis korelasi antara empat variabel yaitu CoF, O/H, BDR, dan NPL dengan periode waktu. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan satuan waktu.

Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,000 dan 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan pada nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa CoF, O/H, BDR, dan NPL memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan satuan waktu.

Besar hubungan yang terbentuk antara keempat variabel tersebut dengan periode waktu adalah sebagai berikut :

- a. CoF sebesar 90,2%
- b. O/H sebesar 99,4%
- c. BDR sebesar 93,2%
- d. NPL sebesar 82,9%

Untuk mengetahui bentuk hubungan yang terjadi antara masing – masing variabel CoF, O/H, BDR, dan NPL dengan waktu maka dilakukan analisis regresi dengan hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. CoF

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.902 ^a	.814	.796	.47985

a. Predictors: (Constant), MONTH, period 12

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.540	.295		18.757	.000
	MONTH, period 12	.266	.040	.902	6.525	.000

a. Dependent Variable: CoF

Model regresi di atas memperlihatkan bahwa satuan waktu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap CoF. Koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebesar 90,2%; sementara besar pengaruh yang terbentuk adalah sebesar 81,4%.

Model regresi yang terbentuk adalah : $Y = 5,540 + 0,266 \text{ Month}$. Model tersebut dapat diterjemahkan bahwa setiap bulan terdapat peningkatan CoF rata – rata sebesar 26,6%.

2. OH

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.994 ^a	.988	.987	.02905

a. Predictors: (Constant), MONTH, period 12

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.642	.018		147.751	.000
	MONTH, period 12	.071	.002	.994	29.056	.000

a. Dependent Variable: O/H

Model regresi di atas memperlihatkan bahwa satuan waktu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap O/H. Koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebesar 99,4%; sementara besar pengaruh yang terbentuk adalah sebesar 98,8%.

Model regresi yang terbentuk adalah : $Y = 2,642 + 0,071 \text{ Month}$. Model tersebut dapat diterjemahkan bahwa setiap bulan terdapat peningkatan O/H rata – rata sebesar 7,2%.

3. BDR

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.932 ^a	.869	.856	.75627

a. Predictors: (Constant), MONTH, period 12

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.385	.465		-2.975	.014
	MONTH, period 12	.516	.063	.932	8.153	.000

a. Dependent Variable: BDR

Model regresi di atas memperlihatkan bahwa satuan waktu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap BDR. Koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebesar 93,2%; sementara besar pengaruh yang terbentuk adalah sebesar 86,9%.

Model regresi yang terbentuk adalah : $Y = -1,385 + 0,516 \text{ Month}$. Model tersebut dapat diterjemahkan bahwa setiap bulan terdapat peningkatan BDR rata – rata sebesar 51,6%.

4. NPL

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.829 ^a	.688	.656	.38840

a. Predictors: (Constant), MONTH, period 12

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.504	.239		-2.108	.061
	MONTH, period 12	.152	.032	.829	4.691	.001

a. Dependent Variable: NPL

Model regresi di atas memperlihatkan bahwa satuan waktu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap NPL. Koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebesar 82,9%; sementara besar pengaruh yang terbentuk adalah sebesar 68,8%.

Model regresi yang terbentuk adalah : $Y = -0,504 + 0,152 \text{ Month}$. Model tersebut dapat diterjemahkan bahwa setiap bulan terdapat peningkatan NPL rata – rata sebesar 15,2%.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

Tingginya sektor UKM yang ada di Indonesia membuat banyak pihak memikirkan solusi untuk memberikan sektor ini berkembang. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah memberikan kemudahan bagi sektor UKM dengan membuat produk yang dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dipasarkan sejak Januari 2008 sampai dengan saat ini. Kesulitan yang dialami oleh sektor UKM adalah pada besarnya ratio modal yang biasanya harus diserahkan kepada perbankan. Dengan program ini calon debitur cukup menyerahkan 30-40% jaminan dari plafond kredit yang diajukan.

Beberapa variabel yang digunakan adalah tingkat *Cost of Fund*, *Overhead Cost*, *Bad Debt Ratio (BDR)* dan *Non Performing Loan (NPL)*. Analisa yang dilakukan adalah analisa deskriptif dan dilanjutkan dengan analisa korelasi / analisa deret waktu. Adapun hasil analisis adalah :

- 1 a. Seiring dengan waktu terdapat pengaruh *Cost of Fund*, $Y = 5,540 + 0,266$ Month terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat baik kredit investasi dan kredit modal kerja secara parsial kepada sektor UKM pada PT. Bank Bukopin, Tbk di Jakarta periode Januari 2008 – Desember 2008.
- b. Seiring dengan waktu terdapat pengaruh *Overhead Cost*, $Y = 2,642 + 0,071$ Month terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat baik kredit investasi dan kredit modal kerja secara parsial kepada sektor UKM pada PT. Bank Bukopin, Tbk di Jakarta periode Januari 2008 – Desember 2008.

- c. Seiring dengan waktu terdapat pengaruh *Bad Debt Ratio*, $Y = -1,385 + 0,516 \text{ Month}$ terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat baik kredit investasi dan kredit modal kerja secara parsial kepada sektor UKM pada PT. Bank Bukopin, Tbk di Jakarta periode Januari 2008 – Desember 2008.
- d. Seiring dengan waktu terdapat pengaruh *Non Performing Loan*, $Y = -0,504 + 0,152 \text{ Month}$ terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat baik kredit investasi dan kredit modal kerja secara parsial kepada sektor UKM pada PT. Bank Bukopin, Tbk di Jakarta periode Januari 2008 – Desember 2008.
- 2 Keempat variabel tersebut : *Cost of Fund*, *Overhead Cost*, *Bad Debt Ratio* dan *Non Performing Loan* berpengaruh nyata dan signifikan terhadap Kredit Usaha Rakyat, sehingga terjadi penurunan penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada sektor UKM pada PT. Bank Bukopin, Tbk di Jakarta periode Januari 2008 – Desember 2008..

Oleh karena itu maka perlu untuk dikaji ulang produk Kredit Usaha Rakyat yang ternyata berdampak pada kinerja bank pelaksana khususnya PT. Bank Bukopin, Tbk. Diperlukan metode yang lebih akurat dalam proses analisa dan monitoring baik sebelum dan sesudah proses kredit diberikan.

DAFTAR REFERENSI

- Bank Bukopin. 2005. Dasar-Dasar Perkreditan. Bank Bukopin, Jakarta.
- Bank Indonesia. 2004. Laporan Triwulanan Perkembangan Moneter, Sistem Pembayaran, dan Perbankan Vol.4, No.1, Januari - Maret 2004.
- Chia, Yew Ming. 1995. "Decentralization, Management Accounting System (MAS) Information Characteristics and Their Interaction Effects on Managerial Performance: A Singapore Study", *Journal of Business Finance and Accounting*. September. pp. 811-830.
- Chong V.K. 1996. "Management Accounting Systems, Task Uncertainty and Managerial Performance: A Research Note", *Accounting, Organizations and Society*. Vol.21. pp.415-421.
- Chong, V.K. dan Kar Ming Chong .1997. "Strategic Choices, Environmental Uncertainty and SBU Performance: A Note of the Intervening Role of Management Accounting Systems", *Accounting and Bussiness Research*. Vol.27. No.4.pp.268-276.
- Dahlan Siamat. 1993. "Manajemen Lembaga Keuangan", Edisi kedua. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Depkop. 2005. Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Periode Tahun 2005 - 2009, (2005), http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=552&Itemid=229
- Gull, F. A., Chia YM. "The effect of Management Accounting System Perceived Environmental Uncertainty and Decentralization and Managerial Performance: A Test Three Ways Interaction," *Accounting Organizations and society*. Vol 19, No.1, 1994.
- Gul, F.A. (1991), "The Effects of Management Accounting Systems and Environmental Uncertainty on Small Business Managers' Performance", *Accounting and Business Research*, Vol.22, No.85,pp. 57-61.
- Harmanta dan Mahyus Ekananda. 2005. "Disintermediasi Fungsi Perbankan diIndonesia Pasca Krisis 1997 : Faktor Permintaan atau Penawaran Kredit, Sebuah Pendekatan dengan Model Disequilibrium". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Juni 2005.

- Herri dan Suhairi, 2004, *Karakteristik Kewirausahaan dan Prestasi Usaha Kecil dan Menengah Indonesia, (Pendekatan Berbasis Sumber Daya), Laporan Penelitian BPPT-Menristek.*
- Kasmir. 2001. *Bank dan Lembaga keuangan lainnya.* Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Muljono, T.P. 1993. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial.* BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 1992. *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Undang-Undang Perbankan Nasional.* Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 1995. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.* Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 1998. *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1998.* Republik Indonesia.
- Santoso, R.T. 2001. *Kredit Usaha Perbankan.* Andi Yogyakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah (1995), *Manajemen Dana Bank,* Rineke Cipta, Jakarta.
- Suseno dan Piter Abdullah. 2003. *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia.* Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI.
- Sutojo, Siswanto (2000), *Strategi Manajemen Bank Kredit,* Damar Mulia Pustaka, Jakarta.
- Suyatno, T., Cholik, H.A., Sukada, M., Ananda, T.Y., Marala, D.T. 1995 *Dasar-dasar perkreditan,* Jakarta: Gramedia.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 10, Tahun 1998 tentang Perbankan (Perubahan atas Undang-undang No. 7, Tahun 1992).